

336.22
FKA

8 c. 1

**STUDI EMPIRIS TENTANG PENGARUH FAKTOR-FAKTOR
YANG MELEKAT PADA WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT
KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KOTA BENGKULU**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
memperoleh derajat S-2 Magister Akuntansi**



Diajukan Oleh:

Nama : Fraternesi

NIM : C4C099413

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2002**

UPT-PUSTAK-UNDIP

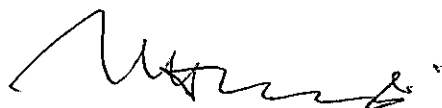
Tesis Berjudul

**STUDI EMPIRIS TENTANG PENGARUH FAKTOR-FAKTOR
YANG MELEKAT PADA WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT
KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KOTA BENGKULU**

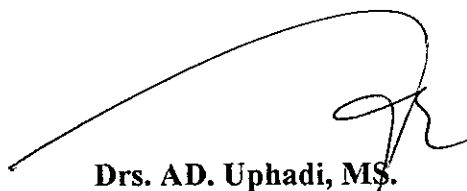
yang dipersiapkan dan disusun oleh
Fratnesi
telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 16 Januari 2002
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama/Ketua

Pembimbing/Anggota

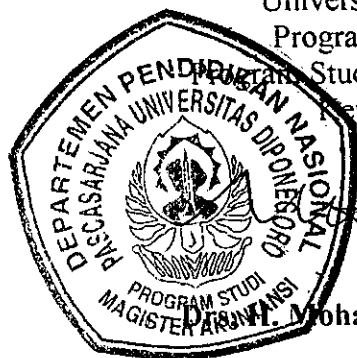


Drs. H. Mohamad Nasir, Msi, Akt.



Drs. AD. Uphadi, MS.

Semarang, 16 Januari 2002
Universitas Diponegoro
Program Pascasarjana
Studi Magister Akuntansi
Ketua Program



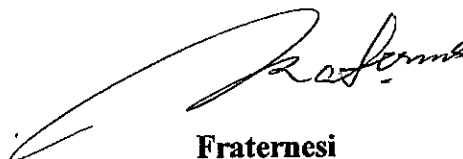
Drs. H. Mohamad Nasir, Msi, Akt.



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Karya ini adalah milik saya dan pertanggungjawabannya sepenuhnya berada di pundak saya.

Semarang, Januari 2002.



Fraternesi

MOTTO :

SAINS DAN RELIGIUS

Tesis ini ku persembahkan buat:
Ayah dan Ibuku tercinta
Kakak-kakakku, Adik-adikku, dan Ponakan-ponakanku
Isteriku : Rohana Tuslainy
Anak- anakku:
Rofran Samera
Etika Prameswari
Nur Aulia Fitri
Muhammad Natsir Kholis
Riqah Izzatin Ni'mah

ABSTRACT

There are four main elements of taxation success : Tax Law, Tax Administration, Tax Policy and Tax Payer. For tax officers (Fiscus), the tax payer element is uncontrollable in nature. Therefore, the knowledge about the tax payer will make easier for any effort in increasing the tax success. So, the problem of this study is the factors that attach to tax payer affect in increasing Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) collection in Bengkulu. The objective of this study is to observe the factors that attach to tax payer affect in increasing PBB collection in Bengkulu and also can make the research model. The result of this study can give the benefit and input to Local Government, especially the tax officer.

The types of data are primary data and secondary data. The primary data is the data that are collected through questioners, and secondary data is the data collected from PBB service institution, local income bureau and other institutions. Then, the data was analyzed by multiple regression.

In general, this research has concluded that :

1. The factors that are proven to have significant effects on the PBB collection success in Bengkulu is, 1) The taxation consciousness, 2) The ratio of the PBB levy compared to tax payer income, 3) The attitude of tax payer towards regional development, 4) The attitude of tax payer on the implementation of the PBB fines, 5) The opinion of tax payer that the evasion on the PBB has been common, 6) The level of tax payer education, 7) The status of land and building ownership and 8) The opinion of tax payer toward fiscus service.
2. The factors that are proven to have not significant effects on the PBB collection success in Bengkulu is, 1) The ratio of calculated difference in the permanent difference, 2) The opinion of tax payer on the PBB burden, and 3) The length of stay in the location of PBB object.

There are some suggestions of this study for researchers, this research available to be follows up for future research and for practices can increase the tax income, improve the tax accounting, and careful and fair in set the NJOP.

Key Words : Property Tax- Taxation Success- Tax Payer- Collection Rate.

ABSTRAK

Ada empat elemen penting keberhasilan perpajakan yaitu Tax Law, Tax Administration, Tax Policy dan Tax Payer atau wajib pajak. Untuk Fiskus elemen wajib pajak bersifat uncontrollable. Pengetahuan tentang wajib pajak akan memudahkan setiap upaya peningkatan keberhasilan perpajakan. Sehingga permasalahan yang diajukan adalah: Apakah faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu dan sejauh mungkin dapat menciptakan suatu model penelitian. Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan manfaat dan masukan bagi Pemerintah Daerah, khususnya aparat perpajakan.

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yaitu data yang dikumpulkan lewat kuesioner dan data sekunder yang dikumpulkan dari kantor pelayanan PBB, dinas pendapatan daerah dan instansi lainnya. Metode pengumpulan data dengan kunjungan (visite), selanjutnya data diolah dan dianalisa dengan regresi linear berganda.

Secara umum kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor yang telah terbukti berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu adalah : kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan dengan pendapatan wajib pajak, sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah, sikap wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, pendapat wajib pajak bahwa penghindaran PBB telah umum, pendidikan wajib pajak, status tanah/ rumah wajib pajak dan sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus.
2. Faktor-faktor yang tidak terbukti berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu adalah : rasio beda hitung permanent difference, pendapat wajib pajak terhadap berat tidaknya beban PBB, dan lama tinggal wajib pajak.

Ada beberapa saran yang perlu disampaikan : Bagi peneliti kiranya penelitian ini dapat ditindak lanjuti dan bagi praktisi kiranya dapat meningkatkan aktivitas penagihan pajak, menggalakkan penyuluhan, menyempurnakan akuntansi perpajakan dan dalam penetapan NJOP hendaknya mengandung azas ketelitian dan keadilan.

Kata Kunci : Pajak properti, Keberhasilan perpajakan, Wajib pajak, Tingkat penerimaan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kepada Allah Swt. Atas berkah dan rahmatNya sehingga tesis yang berjudul “Studi Empiris Tentang Pengaruh Faktor-faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan PBB di Bengkulu” telah dapat diselesaikan.

Tesis ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh derajat S-2 pada Program studi Magister Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Banyak pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini, untuk itu kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs.H.Moch.Nasir,M.Si., Akt. Selaku ketua Program studi Magister Akuntansi dan sekaligus selaku ketua dosen pembimbing dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Drs.Ad.Uphadi,Ms. Selaku anggota dosen pembimbing dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr.Imam Ghozali,M.Com.Akt. selaku sekretaris bidang akademik.
4. Bapak Drs. Kholiq Mahfud,M.Si. selaku sekretaris bidang administrasi dan keuangan.
5. Bapak dan Ibu dosen pada program studi Magister Akuntansi
6. Bapak dan Ibu staf pengelola program studi Magister Akuntansi
7. Bapak Gubernur cq. Sekretaris Daerah Tk.I Bengkulu
8. Bapak Walikota Kota Bengkulu
9. Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) di Bengkulu
10. Rekan-rekan seperjuangan yang telah membantu fasilitas komputer
11. Semua keluarga besarku yang telah mendukung sehingga tesis dan studi ini telah dapat diselesaikan

Kami menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan.

Semarang, 16 Januari 2002

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iv
Ringkasan/Abstrak Bahasa Inggris.....	v
Ringkasan / Abstrak Bahasa Indonesia	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
 BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan Penelitian	7
4. Manfaat Penelitian	7
 BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
1. Telaah Pustaka	8
2. Penelitian Terdahulu	21
3. Kerangka Pemikiran Teoritis	24
4. Perumusan Hipotesis	25

BAB III : METODE PENELITIAN

1. Jenis Dan Sumber Data	26
2. Populasi Dan Prosedur Pengumpulan Sampel	26
3. Metode Pengumpulan Data	28
4. Definisi Operasional Variabel Dan Identifikasi Variabel	30
5. Teknis Analisis Data	35

BAB IV : PEMBAHASAN DAN IMPLIKASI HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Responden	36
2. Profil Responden	39
3. Uji Outlier.....	42
4. Uji Kualitas Data	
4.1. Uji Reliability	43
4.2. Uji Validity	43
5. Uji Asumsi Klasik	44
6. Uji Hipotesis	49
7. Pembahasan Dan Implikasi Hasil Penelitian	58

BAB.V : KESIMPULAN KETERBATASAN DAN SARAN

1. Kesimpulan	63
2. Keterbatasan	65
3. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

<u>No.</u>	<u>Judul Tabel</u>	<u>Hal.</u>
01	Realisasi Penerimaan Pajak 5 (lima) tahunan (dalam milyar rupiah)	2
02	Realisasi Penerimaan PBB (dalam milyar rupiah)	3
03	Potensi Dan Target Penerimaan PBB tahun 1999/2000 per Kabupaten dan Kota se Propinsi Bengkulu (dalam ribuan rupiah)	6
04	Penentuan Sampel per Kecamatan Kab/Kota Bengkulu	28
05	Identifikasi Variabel Penelitian Dan Analisis Statistiknya	33
06	Luas Tanah Yang dikenakan Pemungutan PBB Menurut Sektor di Kota Bengkulu	37
07	Jumlah wp Dan Ketetapan Pajak Terhutang per Kecamatan di Kota Bengkulu	38
08	Collection Rate Kota Bengkulu dari Tahun 1997/1998 s.d. 2000	38
09	Laporan Tunggakan PBB Kantor Pelayanan PBB (sektor Perkotaan) di Bengkulu tahun 1996 s.d. 2000 (Rp.ooo)	39
10	Statistik Deskriptif	39
11	Tingkat Pendidikan Responden	40
12	Lama Tinggal Wp	41
13	Collection Rate Responden	42
14	Hasil Cronbach-Alpha Masing-masing Variabel	43
15	Hasil Uji Validitas	43
16	Output SPSS Durbin-Watson	44
17	Koeffisien Regresi dan Signifikansi	50

DAFTAR GAMBAR

<u>No.</u>	<u>Nama Gambar</u>	<u>Hal.</u>
01	Pengaruh Antara Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan PBB di Bengkulu	24
02	Gambar Scatterplot	46
03	Normal Probability Plots	47

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Nama Lampiran
01	Uji Hipotesis
	1.1. Model Summary
	1.2. ANOVA
	1.3. Coefficients Regresi, Signifikansi, Collinearity Statistics
02	Uji Normalitas dan Uji Heteroskedastisitas
	2.1 Histogram
	2.2. Normal P.P Plot of regression Standardized Residual
	2.3. Scatterplot
03	Uji Multikolinearitas
04	Uji Validitas Kesadaran Perpajakan
05	Uji Validitas Sikap wp thd. Pembangunan Daerah
06	Uji Validitas Sikap wp thd. Denda
07	Uji Validitas Sikap wp thd. Penghindaran PBB
08	Uji Validitas Sikap wp thd. Fiskus
09	Uji Reliability Kes. Perpajakan
10	Uji Reliability Sikap wp thd. Pemb. Daerah
11	Uji Reliability wp thd. Penghindaran PBB
12	Uji Reliability Sikap wp thd. Denda
13	Uji Reliability Sikap wp thd. Fiskus
14	Kuesioner
15	R. Square adjusted New
16	Uji Mahalanobis
17	Unstandardised data
18	Data penelitian Distandardised
19	Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan rakyat . Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah memerlukan dana yang sumber utamanya adalah pajak. Dalam APBN 2001 misalnya mengandalkan 68,34 % penerimaan perpajakan dari total penerimaan dalam negeri (Kompas, 19 April 2001).

Pajak berfungsi *budgeter-regulerend-social* . Pajak berfungsi *budgeter* artinya pajak bersifat kontraksi terhadap dana masyarakat dan memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk budget (APBN/APBD). Sedangkan sisi lain budget yaitu belanja atau pengeluaran pemerintah berefek *multiplier* bagi perekonomian negara. Pajak berfungsi *regulerend* artinya pajak adalah instrumen untuk mengatur dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pajak berfungsi sosial artinya pajak adalah instrumen untuk mengurangi perbedaan si kaya dan si miskin.

Pemerintah pada tahun 1983 mengadakan *tax-reform* (pembaharuan perpajakan), dan menyempurnakannya pada tahun 1994, *tax-reform* penting karena menghapus sistem perpajakan lama yang terlalu ruwet, dan memberikan fasilitas *budgeter-regulerend-social* pajak. *Tax-reform* menghasilkan sistem perpajakan yang sederhana, mudah, adil dan memberikan kepastian hukum (*rechssicherheit*). Akibatnya sistim perpajakan sekarang ini mudah dipelajari, dipahami dan dipatuhi. *Tax-reform* ini bertujuan mendorong keberhasilan perpajakan., dan kenyataannya berhasil.

Tabel nomor 01 dibawah ini menunjukkan keberhasilan *tax-reform* tersebut, yang ditandai dengan kenaikan penerimaan perpajakan (termasuk PBB).

Tabel no. 01.

REALISASI PENERIMAAN PAJAK 5 (LIMA) TAHUNAN
(DALAM MILYAR RUPIAH)

Keterangan	Tahun Anggaran				
	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99
Penerimaan Pajak	44.442	48.686	57.340	70.934	96.500
Kenaikan (%)	-	9,54	17,77	23,70	36,04

Sumber: diolah dari realisasi APBN.

Salah satu pajak dalam negeri adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang memang nilai rupiahnya relatif kecil dibandingkan dengan pajak lain, seperti dalam APBN 2001 hanya 2,48 % dari total penerimaan perpajakan (Kompas, 19 April 2001), tetapi mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan dan merupakan sumber penerimaan pembangunan utama pemerintah daerah, mempunyai jumlah wajib pajak (WP) terbesar dibandingkan pajak-pajak lain, penerimaan PBB dari tahun ke tahun terus meningkat, dan PBB merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia. Dengan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (pasal 6 ayat 2) yang berbunyi: Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbalan 10 % (sepuluh persen) untuk Pemerintah pusat dan 90 % (sembilan puluh persen) untuk daerah. Berdasarkan Undang-Undang ini memberikan semangat kepada daerah-daerah untuk meningkatkan semua aspek yang

berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Ini merupakan alasan pertama pentingnya penelitian ini.

Tabel nomor 02 dibawah ini menunjukkan realisasi penerimaan PBB dari tahun anggaran 1994/1995 s.d tahun 1998/1999 dalam APBN.

Tabel nomor 02
REALISASI PENERIMAAN PBB (DALAM MILYAR RUPIAH)

Keterangan	Tahun Anggaran				
	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999
Penrimaan PBB	1.647	1.894	2.413	2.641	3.163
Kenaikan (%)	-	14,99	27,40	9,44	19,76

Sumber : diolah dari realisasi APBN

Penelitian perpajakan, baik makro maupun mikro, termasuk PBB perlu dilanjutkan dan diperluas, sehubungan dengan perubahan kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah., ini merupakan alasan kedua pentingnya penelitian ini.

Menurut Achmad Syarifuddin Alsah (dalam Bambang Suhardito dan Bambang Sudiby, 1996), ukuran keberhasilan perpajakan adalah *collection rate*, *coverage ratio*, dan *tax ratio*. *Collection rate* atau keberhasilan penerimaan pajak adalah ratio tingkat kepatuhan pembayaran pajak wajib pajak dibandingkan dengan pokok ketetapannya pada tahun yang bersangkutan. *Coverage ratio* adalah besarnya wajib pajak riil dibandingkan wajib pajak potensial. Sedangkan *Tax ratio* adalah perbandingan penerimaan pajak total dibandingkan *Gross National Product* (GNP). Keberhasilan penerimaan pajak merupakan salah satu ukuran keberhasilan perpajakan, karena kesesuaiannya dengan fungsi *budgeter* pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perpajakan, termasuk PBB seperti yang dikemukakan oleh Fuad Bawazier (1993) adalah *Tax Law, Tax Policy, Tax Administration*, dan *Tax Payer*. Sementara itu menurut Guritno (1987) ada tiga faktor keberhasilan perpajakan yaitu sistem administrasi dan hukum, kualitas aparat perpajakan, dan kepatuhan masyarakat membayar pajak. Sedangkan menurut Chairul Amachi (1992) faktor-faktor keberhasilan perpajakan adalah faktor administrasi negara dan pajak, faktor undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, dan faktor masyarakat, khususnya wajib pajak dan keadaan lingkungan. Faktor-faktor yang disepakati oleh mereka bertiga adalah *Tax law, Tax Administration*, dan *Tax payer*. Faktor *tax-Payer* (wajib pajak) atau dengan perkataan lain faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak meliputi faktor demografi, kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan pendapatan wajib pajak, rasio beda hitung *permanent difference*, sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan daerah, pendapat wajib pajak tentang sanksi denda PBB, pendapat wajib pajak bahwa penghindaran PBB telah umum, pendapat wajib pajak terhadap beban PBB, serta pendapat wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus. Untuk Dirjen pajak, faktor-faktor tersebut relatif bersifat *uncontrollable*, ini merupakan alasan ketiga dan sekaligus fokus penelitian ini. Pengetahuan tentang faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak PBB ini merupakan input penting bagi Direktorat PBB, dan pejabat lain yang ada hubungannya dengan objek pajak, sehingga sangat berperan penting dalam upaya peningkatan keberhasilan PBB. Ini merupakan alasan keempat pentingnya penelitian ini.

Selain itu pengetahuan tentang faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak juga dapat dipergunakan dalam upaya peningkatan perpajakan di Indonesia, karena wajib pajak lain juga merupakan wajib pajak PBB. Ini juga merupakan input penting bagi Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah daerah, khususnya dinas pendapatan daerah. Ini merupakan alasan kelima pentingnya penelitian ini.

Kemudian atas dasar surat edaran Dirjen Pajak Nomor SE.21/PJ-6/200 tanggal 25 Mei 2000 tentang evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB TA.1999/2000 s.d. triwulan IV, bahwa Kanwil III (Bengkulu) merupakan peringkat lima terendah dalam penerimaan PBB per KP PBB seluruh Indonesia . Dengan alasan itu maka objek penelitian adalah wajib pajak PBB di Bengkulu. Dan ditetapkan disektor perkotaan, karena menurut Fuad Bawazier (1993) dalam CFMS 1993:5-16, bahwa potensi wajib pajak PBB sektor perkotaan tinggi tetapi tingkat kepatuhannya rendah.

Tabel 03 berikut ini menyajikan potensi dan target penerimaan PBB per Kabupaten dan Kota se- Propinsi Bengkulu.

Tabel nomor 03
POTENSI DAN TARGET PENERIMAAN PBB TAHUN 1999/2000
 Per KABUPATEN dan KOTA se PROPINSI BENGKULU
 (DALAM RIBUAN RUPIAH)

No.	Kab./Kota	Potensi Penerimaan	Target/rencana Penerimaan	%
1.	Kota Bengkulu	3.643.756	1.425.227	44,73
2.	Kab.Bengkulu Utara	9.184.585	5.089.541	55,41
3.	Kab.Bengkulu Selatan	11.127.429	5.142.200	46,21
4.	Kab.Rejang Lebong	3.749.794	2.481.995	66,19

Sumber: Kantor pelayanan Pajak PBB Bengkulu

(diolah dari laporan KP PBB Bengkulu bulan Juli 2000).

Dari tabel tersebut kota Bengkulu merupakan target/ rencana penerimaan PBB terendah (44,73 %) dibandingkan dengan Kabupaten/Tk.II lainnya.

2. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan PBB (*collection rate*) adalah *Tax Law*, *Tax Administration*, dan *Tax Payer*. Faktor *Tax Payer* dengan kata lain faktor – faktor yang melekat pada WP relatif bersifat *uncontrollable*. Sedangkan faktor – faktor tersebut merupakan input penting bagi Direktorat PBB, dan aparat lain yang ada hubungannya dengan obyek pajak PBB. Sehingga dapat berperan dalam meningkatkan keberhasilan penerimaan PBB. Oleh sebab itu maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

Apakah faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu ?

3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan, sebagai berikut :

Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak sebagaimana yang telah diuraikan diatas terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu. Dan dapat menciptakan suatu model penelitian.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi perpajakan dan akuntansi Pemerintahan. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya aparat perpajakan dalam merealisasikan diberlakukannya otonomi daerah.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

1. Telaah Pustaka

1.1. Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (dalam S.Munawir,1992:1) pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publieke uitgaven*). Definisi pajak soemitro ini banyak disitir oleh para ahli lain atau dalam literatur-literatur lain seperti Usman dan Subroto (1980) Subekti (1985), Lasmana (1989:1), P3 A Depdikbud (1990/1991:2), Tubagus Chairul Amachi Zandjani (1992:1), Munawir (1992:1) dan Suparmoko (1992:94).

Pajak berfungsi *Budgetair*, *Regulerend*, dan *Social* (Prawirosetoto,1989:70-73; Munawir,1992:5; Chairul Amachi Zandjani,1992:2; Guritno,1992:1-5 dan 1994:43-114). Pajak berfungsi *budgetair* artinya pajak bersifat kontraksi terhadap dana masyarakat dan memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk APBN, sedangkan sisi lain APBN yaitu sisi belanja atau pengeluaran pemerintah berefek *multiplier* bagi perekonomian negara (Suparmoko,1992:55-68), Fuad Bawazier 1994 (dalam Guritno, 1994:xvii). Pajak berfungsi *regulerend* artinya pajak adalah instrumen untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan sosial ekonomi negara. Pajak berfungsi sosial artinya pengakuan dan pemanfaatan hak milik perorangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan

masyarakat, dan pajak adalah instrumen untuk mengurangi perbedaan si kaya dan miskin.

Pajak sebagai turunan APBN berkarakteristik alokasi distribusi dan stabilisasi, dan beratribut ekonomis, efisien dan efektif (Prawirosetoto,1989:67-76). Fungsi alokasi APBN dan pajak bertujuan mengatasi ketidak efisienan alokasi sumber daya bila alokasi tersebut berdasarkan mekanisme pasar. Fungsi distribusi APBN dan pajak bertujuan pemerataan mengatasi ketimpangan sosial sebab masalah pemerataan tidak mungkin diserahkan kepada mekanisme pasar. Fungsi stabilisasi APBN dan pajak bertujuan mengurangi pengangguran (peningkatan kesempatan kerja) bersama sama-sama dengan efektifitas pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Pelaksanaan ketiga fungsi APBN dan pajak tadi tetap dalam konteks ekonomisasi pemakaian sumber daya yang langka, secara efisien dan efektif.

Pertumbuhan ekonomi akan terganggu bila kontraksi pajak terlalu tinggi, sebaliknya pemungutan pajak yang terlalu rendah mengakibatkan pemberian jasa-jasa dan layanan pemerintah kepada masyarakat terganggu. Oleh karena itu *policy* perpajakan harus ditetapkan secara hati-hati (Suparmoko 1992:255-264); Prawirosetoto,1989:70-78; Fuad Bawazier,1994 dalam Guritno 1994:xviii-xxi; Guritno 1994 :43-114).

1.2. Karakteristik Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak kebendaan (*objektif/zakelijk*), artinya penetapan pajak tidak melihat kemampuan ekonomis subjek pajak. Daftar Himpunan Ketetapan pajak (DHPK), disebut buku induk PBB, tidak membedakan wajib pajak

Badan/perusahaan dengan wajib pajak Nir Badan/perusahaan, tetapi membedakan wajib pajak berdasarkan luas, klasifikasi dan lokasi obyek pajak. Atau dengan perkataan lain pengenaan PBB tidak berdasarkan aktivitas dan bentuk perusahaan, tetapi berdasarkan luas, klasifikasi dan lokasi obyek pajak.

Dampak *tax-reform* 1983 dan *tax reform* revisi 1994 adalah membuat PBB berazas mudah, sederhana, adil, mudah dimengerti, mudah dilaksanakan, mudah dihayati, menghilangkan pengenaan pajak berganda, dan kepastian hukum. Sedangkan sifat khusus PBB adalah 1) digunakan untuk *public investment* langsung, 2) Pajak tidak langsung, dan 3) bertarif proporsional (0,5 %).

Selain itu PBB berkarakter khusus berikut :

1. Jumlah wajib pajak PBB besar, terbanyak dibandingkan wajib pajak lain.
2. Aktivitas penagihan melalui aparat pemerintah daerah. Departemen Keuangan,
3. Direktorat Jenderal PBB ikut menikmati atau memanfaatkan *Kamukten* Pemerintah daerah.
4. Dari segi tujuan pengenaannya, menurut Guritno (1992) PBB bertujuan untuk menjadi sumber penerimaan pemerintah, selain PPN dan pph.
5. PBB dipakai sebagai agunan pinjaman (pembangunan) daerah. Perlakuan terhadap dana hasil pemungutan PBB sebagai dana rutin dan bersifat pembangunan umum (seperti unsur penerimaan *General fund*), bukan pengelolaan terpadu (seperti *capital project Fund*) dan bukan sebagai cadangan pelunasan hutang (seperti *Debt service Fund*) (Douglas,1991; Henke, 1989 ; Freeman, 1988; Herbert ,1987 ; Schroederet , 1987 dan Hay,1985), dalam Bambang Suhardito dan Bambang Sudibyو (1996, h.29)

1.3. Faktor Keberhasilan Penerimaan Perpajakan

1.3.1 Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak dengan mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan adanya kesadaran perpajakan berarti seorang wajib pajak telah memahami tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.

1.3.2. Rasio Beban PBB dibandingkan dengan Pendapatan Wajib Pajak

PBB merupakan pajak objektif kebendaan, walaupun demikian PBB dibayar oleh pendapatan wajib pajak, maka pendapatan wajib pajak akan mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan pajak PBB. Hubungan fungsional antara beban PBB dengan pendapatan telah dibuktikan oleh penelitian Guritno (1987, dalam Guritno 1994:105) ada dua metode mengukur pendapatan seseorang yaitu *take home pay* dan *disposable income*. Penelitian yang menggunakan metode *disposable income*, dan berelemen pangan, papan, transportasi, kesehatan, pendidikan, listrik, air bersih, telepon dan tabungan.

1.3.3. Beda Perhitungan *Permanent-Different*

Perbedaan yang ada antara fisksus dengan WP adalah “saat” dan “dasar” penetapan pajak. Penetapan PBB memakai dasar kondisi tanah dan bangunan pada

tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan, dan praktiknya fiskus memakai dasar tersebut untuk penetapan PBB tahun berikutnya. Laporan kondisi tanah dan bangunan pada tanggal 1 Januari tersebut adalah SPOP. SPOP berisikan data luas tanah dan bangunan, lokasi dan jenis bangunan. Perbedaan pendapat antara WP PBB dan fiskus terhadap data SPOP tidak ada, artinya *timing different* tidak ada.

Perbedaan fiskus dengan WP PBB yang ada adalah perbedaan perhitungan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) karena memakai dasar perhitungan yang berbeda. Wajib Pajak memakai dasar transaksi jual beli yang terjadi di blok atau zone yang bersangkutan. Sedangkan Fiskus memakai dasar perhitungan “nilai buku”, atau dengan perkataan lain memakai dasar perhitungan akuntansi. Oleh karena itu penetapan rasio beda hitung *permanent-different* sebagai variabel bebas penelitian ini adalah sah.

1.3.4. Sikap Wajib Pajak Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah.

Hasil penerimaan PBB dipergunakan untuk pembangunan infra struktur daerah yang bersangkutan, tetapi karena terbatasnya dana maka pembangunan infra struktur tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas pemerintah daerah yang bersangkutan. Lukman Sutrisno (1994 :4) mengatakan bahwa layanan pemerintah termasuk pembangunan infra struktur akan mempengaruhi pembayaran pajak PBB. Khususnya wajib pajak PBB perkotaan. Oleh karena itu penetapan sikap wajib pajak PBB terhadap prioritas pembangunan daerah sebagai variabel bebas adalah sah.

1.3.5. Pendapat WP Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda PBB

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan oleh masyarakat. Supaya undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi maka ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian juga untuk hukum pajak. Sanksi PBB dimulai dari yang ringan, yaitu peringatan dan teguran sampai yang terberat kurungan atau sita. Sanksi PBB yang banyak diterapkan adalah denda. Masyarakat akan mematuhi pembayaran PBB bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya, maka penetapan pendapat atau pandangan masyarakat terhadap sanksi denda PBB sebagai variabel bebas penelitian ini sah.

1.3.6. Pendapat WP Bahwa Penghindaran PBB Telah Umum

Keadilan perpajakan yang baik berekuiti dua yaitu *horizontal equity* dan *vertical equity*. Ketidakadilan perpajakan atau kerusakan horizontal dan vertikal ekuiti akan menyebabkan merosotnya bahkan hilangnya kepatuhan para WP. Gejala ketidakadilan perpajakan adalah penghindaran dan pembangkangan terhadap kewajiban pajak telah menjadi perihal yang umum. Adanya *evasion* atau *avoidance* atau mudahnya orang melakukannya akan menyebabkan *tax-morality* menjadi rendah (kasus Caymen Island). Tax evasion dan tax avoidance menyebabkan rusaknya prinsip horizontal dan vertical equity (Guritno Mangkoesobroto, 1992).

Pendapat atau pandangan masyarakat berisikan opini atau pengetahuan yang belum tentu sesuai dengan kenyataan, demikian juga pendapat masyarakat terhadap

penghindaran PBB. Walaupun secara empiris penghindaran PBB belum terbukti, namun pendapat ini akan mempengaruhi perilaku pembayaran PBB.

1.3.7. Pendapat Wajib Pajak Terhadap Berat Tidaknya Beban PBB

Beban pajak yang terlalu berat akan membuat WP tidak mampu membayarnya, dan kalau terlalu ringan dan kalau dirasakan ringan wajib pajak akan membayarnya. Oleh karena itu, pendapat wajib pajak PBB terhadap berat tidaknya pajak PBB sebagai variabel bebas adalah sah.

1.3.8. Pendidikan Wajib Pajak

Menurut Guritno (1994:140) pendidikan adalah salah satu elemen sikap wajib pajak yang berpengaruh terhadap keberhasilan perpajakan. Pendidikan mempengaruhi pengetahuan dan merupakan elemen kognitif dan sikap. Oleh karena itu penetapan faktor pendidikan sebagai variabel bebas penelitian ini adalah sah.

1.3.9. Lama Tinggal Wajib Pajak di Lokasi Wajib Pajak PBB

Pada tahun 1987 Guritno melakukan penelitian tentang PBB dan menyimpulkan ada hubungan fungsional antara pembayaran PBB dengan nilai tanah, nilai rumah dan pendapatan. Selain itu PBB adalah pajak objektif/kebendaan. Oleh karena itu penetapan lama tinggal wajib pajak di lokasi wajib pajak PBB sebagai variabel bebas adalah sah.

1.3.10. Pendapat Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Fiskus

Tingkat keberhasilan penerimaan PBB selain dipengaruhi *take-payer* (wajib pajak), juga dipengaruhi oleh *tax-policy*, *tax-administration* dan *tax-law*, namun ketiga faktor terakhir ini melekat dan dikendalikan oleh fiskus itu sendiri. Sehingga pendapat wajib pajak terhadap fiskus merupakan variabel penting dalam penelitian ini yang akan

mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB dapat diandalkan dan sejalan dengan pendapat Lukman Sutrisno (1994:4) bahwa adanya hubungan antara pembayaran pajak dengan mutu pelayanan publik untuk wajib pajak diperkotaan.

Dengan demikian seorang fiskus diharapkan mempunyai kompetensi dalam artian punya *skill*, *knowledge* dan *experience* (keahlian, pengetahuan dan pengalaman) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus termotivasi dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik.

1.4. Akuntansi dan Pajak

Menurut APB 1970 akuntansi berdefinisi sebagai berikut :

Accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions.

Informasi akuntansi ini dipergunakan oleh berbagai pihak, untuk berbagai keperluan. Selain tergantung pada keputusan yang dibuat penggunaan metode pengambilan keputusan, kapasitas pengguna, dan informasi-informasi lain yang tersedia.

Dasar perhitungan PBB adalah informasi akuntansi. Walaupun memakai dasar perhitungan yang sama, ada kemungkinan perbedaan perhitungan pajak antara wajib pajak dan fiskus. Perbedaan ini disebut (1) perbedaan permanen dan (2) perbedaan waktu. Perbedaan permanen adalah perbedaan pengakuan akuntansi dan pajak terhadap pendapatan dan biaya-biaya tertentu, misal bunga deposito, pemakaian sendiri barang

dagangan, biaya jabatan, tunjangan natura karyawan dan lain-lain. Sedangkan perbedaan waktu adalah pengakuan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya antara akuntansi dan pajak. Schroeder (1987) menyitir hal ini sebagai berikut :

.... differences between this financial accounting income and taxable income may arise because of (1) permanent differences and (2) timing differences. Permanent differences arise because of federal economic policy or because congress may wish to alleviate a provision of the tax code that falls too heavily upon one segment of the economy. Permanent differences may affect either financial accounting income or taxable income, but not both. Where permanent difference exist, financial reporting follows the tax treatment. Timing differences between taxable and financial accounting income occur either because revenue is recognized in one period for income tax purposes and in a different period for accounting purposes or because expences are recognized in either an earlier or later period for accounting purposes than for tax purposes.

1.5. Praktik Perpajakan PBB

Sejak akhir tahun 1993 Direktorat PBB memakai Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) untuk menangani informasi tentang obyek pajak PBB. SISMIOP ini menggantikan sistem rincian dan klasiran, sistem lama, untuk mendata obyek pajak PBB. Perbedaan utama SISMIOP dengan sistim lama adalah penggunaan alat bantu komputer untuk SISMIOP.

Sistem ini mengelompokkan obyek pajak dalam satu lokasi blok atau zone. Tanah di blok atau zone yang sama akan berklasifikasi sama, artinya tidak ada perbedaan tarif PBB untuk tanah/bumi per m² antara satu WP dengan WP lainnya di blok atau zone yang sama. Sedangkan tarif PBB untuk bangunan dlam satu blok atau zone akan berbeda tergantung jenis dan mutu bangunan masing-masing.

Semua obyek pajak PBB yaitu tanah, baik yang bersubyek pajak atau tidak (*absentee*) akan didaftar dalam SIMSIOP. SIMSIOP ini mengeliminasi setiap upaya penyelundupan pajak wajib pajak (*tax-evasion*), sebab wajib pajak tidak dapat menyembunyikan obyek pajak PBB dari pendaftaran fiskus.

1.6. Praktik Perpajakan PBB lainnya

Penetapan Subyek pajak, penetapan obyek pajak, penetapan saat terhutangnya pajak, perhitungan penetapan pajak, saat dan cara pelunasan pajak merupakan hal-hal penting dalam praktik perpajakan. Badan Pengawas Keuangan (BPK), (1991) selaku otorita pengawasan tertinggi di Indonesia menyebutkan hal-hal penting sebagai berikut : Dari kegiatan-kegiatan tersebut yang banyak peluang kemungkinan terjadinya penyimpangan atau ketidaktertiban adalah pada kegiatan pendataan dan penilaian, penetapan, pemungutan dan penyetoran disamping pelaksanaan fungsi pelayanan PBB, seperti pemberian pengurangan pajak terhutang.

Oleh karena PBB berjenis pajak obyektif, maka penetapan obyek PBB kita bahas terlebih dahulu . Berdasarkan Undang-undang PBB, obyek PBB adalah bumi dan /atau bangunan. Bangunan berarti semua bentuk konstruksi teknik, seperti bangunan rumah, pagar, kolam renang, keramba dan lain sebagainya. Bumi berarti tempat untuk meletakkan bangunan, meliputi tidak hanya tanah darat , tetapi juga perairan.

Subyek PBB adalah mereka yang mendapatkan manfaat sosial –ekonomis dari obyek PBB, tanpa memandang atas nama siapa hak kepemilikan atas tanah dan bangunan

tersebut. Artinya pemilik tanah dan/atau bangunan obyek pajak PBB belum menjamin yang bersangkutan adalah wp PBB.

Tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan merupakan *cut-off* saat terhutangnya pajak PBB. Artinya kondisi tanah dan bangunan pada tanggal tersebut menjadi dasar perhitungan penetapan PBB pada tahun fiskal yang sama.

Saat pembayaran pokok PBB selambat-lambatnya 6 bulan setelah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) terbit, dan biasanya sekitar akhir bulan Nopember tahun yang bersangkutan. Bila pembayarannya terlambat maka ditambah denda sebesar dua persen (2 %) perbulan dari pokok PBB. Maksimal denda pajak adalah 24 bulan atau 2 tahun. Pembayaran pokok dan ditambah denda PBB harus dibayar lunas sekaligus, tidak boleh diangsur.

Penetapan pajak berdasarkan surat pemberitahuan obyek pajak (SPOP), diisi sendiri oleh wp PBB. Kepada para wp PBB yang obyek pajaknya berubah diberi formulir SPOP oleh fiskus. Tetapi tidak semua wp PBB yang obyek pajaknya berubah diberi formulir SPOP pada tahun berubahnya kondisi obyek PBB, hal ini disebabkan oleh luasnya area yang harus dikelola oleh aparat fiskus. Atas inisiatifnya sendiri wp PBB juga diperbolehkan untuk mengambil SPOP, mengisi dan kemudian menyerahkannya ke fiskus. Kebiasaan praktik yang ada penetapan SPPT berdasarkan SPOP setahun sebelumnya.

Penentuan luas tanah, luas bangunan dan jenis bangunan adalah hak wp PBB, walaupun demikian fiskus dapat mengoreksinya berdasarkan bukti-bukti sah yang diperoleh fiskus dari sumber lain. Sedangkan hak fiskus adalah menetapkan nilai jual

obyek pajak (NJOP)-nya. Penetapan NJOP berdasarkan informasi yang didapat dari Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), aparat pemerintah daerah setempat, dan dari kegiatan fiskus untuk mencari data tersebut ke lapangan. NJOP ditetapkan dari rata-rata harga tanah dan bangunan di suatu blok atau zona daerah tertentu. Revisi NJOP oleh fiskus sekitar 2 tahun sekali.

Wajib pajak PBB dapat melunasi beban pajaknya ke Bank persepsi yang telah ditunjuk, ke aparat fiskus di Kelurahan atau pemerintah daerah, atau langsung ke Kantor Pelayanan PBB setempat.

1.7. Hukum dan Peraturan Perpajakan

Menurut Friedman, (1984) suatu sistim hukum berunsur "*structures*", "*substance*" dan "*legal culture*". *Structures* adalah aparatur yang menghasilkan peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan tersebut, yaitu badan legislative, eksekutif dan yudikatif. *Substance* adalah apa yang dihasilkan oleh suatu sistim hukum dalam bentuk Undang-undang Dasar, Undang-undang dan peraturan serta keputusan-keputusan pengadilan. Sedangkan *legal culture* adalah pandangan orang-orang atau masyarakat terhadap hukum tersebut dan bagaimana fungsi hukum itu dalam kehidupan sehari-hari.

Jika sistim hukum diumpamakan sebagai suatu pabrik, maka Friedman menyebut *structures* adalah mesin yang menghasilkan, *substance* sebagai produk yang dihasilkan, sedang *legal culture* adalah orang-orang yang mengoperasikan mesin, yang mengetahui kapan mesin perlu dihidupkan atau dimatikan. *Legal structure* ini memegang peranan

penting untuk dapat mengarahkan berkembangnya sistim hukum, karena ia berkenan dengan hal bagaimana persepsi, nilai-nilai, idea dan pengharapan masyarakat terhadap hukum.

Suatu *substances* hukum, termasuk hukum pajak , berutilitas karena ia berkarakteristik (1) adanya kepastian hukum (*rechssicherheit*) ; (2) Kemanfaatan (*zweckassigkeit*) ; dan (3) keadilan (*gerechtigheit*).

Hukum pajak yang juga sering disebut hukum fiscal adalah suatu kumpulan peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak.. Hukum pajak ada dua : (1) hukum pajak material dan (2) hukum pajak formil . Hukum pajak material adalah jiwa suatu hukum/perundang-undangan yang mengikat para pelaku hukum, baik disebutkan secara eksplisit ataupun tidak. Contoh hukum pajak material (dalam UUD 1945) disebutkan :Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dalam memori penjelasannya disebutkan : betapa cartanya rakyat, sebagai bangsa, akan hidup dan dari mana didapatnya belanja untuk hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengakuan ini menyatakan bahwa pembangunan negara dari, oleh dan untuk rakyat Indonesia melalui pajak. Pajak berdasarkan hukum dan seluruh warga negara Indonesia adalah wajib pajak.

Hukum pajak formil adalah hukum/peraturan formil yang menjelaskan siapa (subyek), apa (obyek), berapa besar, bagaimana dan kapan suatu pelaksanaan penetapan, pengenaan dan penagihan pajak. Undang-undang nomor 12 tahun 2000 merupakaqn

salah satu contoh hukum pajak formil. Dalam undang-undang tersebut adalah aturan hukum yang menetapkan siapa, apa, bagaimana dan kapan seseorang atau suatu tindakan menjadi subyek/obyek pajak (tertentu). Bila seseorang atau suatu tindakan belum diatur dalam aturan hukum pajak formil tersebut maka ia atau tindakan tersebut bukan subyek/obyek pajak (diperkecualkan sebagai subyek/obyek pajak), walaupun secara material (menurut UUD pasal 23 (2) ia atau tindakan tersebut adalah subyek/obyek pajak.

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang PBB masih sedikit, antara lain :

(1) Roy Kelly (1993), Penelitian PBB Kelly bersifat deskriptif dan memakai pendekatan ekonomi makro dan pembangunan. Pengelolaan data Kelly sedemikian rupa sehingga merupakan input yang penting bagi kebijakan ekonomi pembangunan.

(2) Guritno Mangkoesobroto (1987), Penelitian Guritno menyatakan bahwa penerimaan PBB masih kecil, terutama bila dibandingkan dengan penerimaan pajak lain.

(3) Bambang Suhardito dan Bambang Sudibyo (1996), meneliti faktor-faktor *tax-payer* dan pengaruhnya terhadap keberhasilan perpajakan, penelitian ini melaporkan bahwa : 1) Faktor-faktor yang telah terbukti berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kota Surabaya adalah kesadaran perpajakan WP, rasio beban PBB dibandingkan dengan pendapatan WP, sikap WP terhadap prioritas pembangunan pemerintah, dan *tax-avoidance* WP. Sedangkan faktor-faktor yang melekat pada WP sisanya telah terbukti tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. 2)

Untuk WP PBB Wiraswasta, faktor-faktor yang telah terbukti berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB adalah faktor-faktor kesadaran perpajakan WP, rasio beban PBB dibandingkan pendapatan WP, rasio beda hitung *permanent difference*, sikap WP terhadap pembangunan pemerintah. Sedangkan faktor-faktor yang melekat pada WP sisanya telah terbukti tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. 3)

Untuk WP Nir-wiraswasta faktor-faktor yang telah terbukti berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB adalah faktor-faktor kesadaran perpajakan WP, rasio beban PBB dibandingkan dengan pendapatan WP, sikap WP terhadap prioritas pembangunan pemerintah, pendapat WP tentang pelaksanaan denda PBB, *tax-avoidance* WP, Pendidikan WP dan lama tinggal WP di lokasi objek pajak PBB. Sedangkan faktor-faktor yang melekat pada WP sisanya telah terbukti tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

(4) Suparmi (1986:132-135), dalam penelitian yang berjudul "Dampak penggantian Ipeda dengan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan pemerintah dan beban wajib pajak (Kasus Kabupaten Bojolali) menyimpulkan sebagai berikut : 1) Penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat I meningkatkan rata-rata 10 %, sedangkan untuk daerah tingkat II terjadi penurunan sebesar 7,63 % setelah adanya penggantian Ipeda ke PBB. 2) Dengan dilaksanakannya Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terjadi penurunan tarif khususnya pada tanah-tanah pertanian jika dibandingkan dengan Ipeda. Sehingga menyebabkan turunnya penerimaan daerah tingkat II Bojolali pada tahun 1985/86. Jika dibandingkan dengan penerimaan yang dipungut menurut ketentuan pemerintah tentang Ipeda. 3) Bagian penerimaan dari PBB pada

daerah tingkat II Bojolali sebesar 64,8 % dari seluruh penerimaan yang bersumber dari PBB di daerah yang bersangkutan. Sedangkan pada penerimaan yang dipungut berdasarkan Ipeda , hasil pungutan seluruhnya menjadi hak daerah tingkat II yang bersangkutan. 4) Pelimpahan kewenangan dalam pemungutan PBB sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 1007/KMK.04/1985 tanggal 28 Desember 1985 yaitu menjadi tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan / atau Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II. (5) Diana Betris (1991:46-47), dalam penelitiannya yang berjudul “ Perkembangan dan realisasi pajak bumi dan bangunan di daerah tingkat II Kotamadya Palangka Raya” menyimpulkan bahwa : 1) Penerimaan daerah yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan secara rata-rata dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. 2) Realisasi penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan mengalami fluktuasi dan menunjukkan peranannya yang semakin meningkat yaitu tahun 1985/1986 sebesar 10,40 % hingga tahun 1988/1989 mencapai 22,47 %.

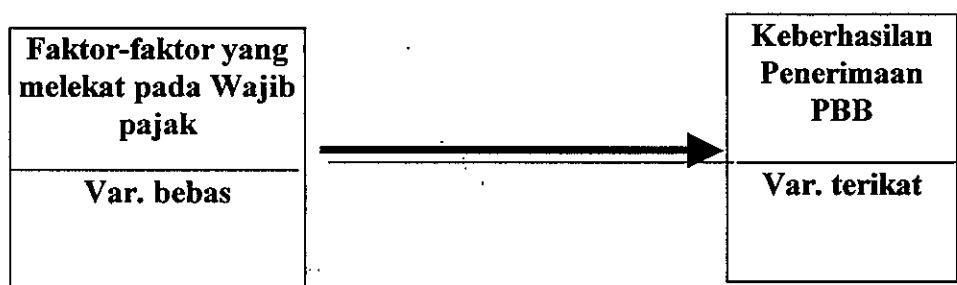
Hubungan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah refleksi dari penelitian Bambang Suhardito dan Bambang Sudibyo (1996), dengan beberapa perubahan dan penambahan sebagai berikut : 1) Variabel kesadaran bernegara dan variabel kesadaran perpajakan wajib pajak pada penelitian Suhardito digabung menjadi satu variabel dalam penelitian ini yaitu kesadaran perpajakan, oleh karena kesadaran perpajakan sudah termasuk didalam kesadaran bernegara. 2) Penelitian ini tidak membedakan wajib pajak wiraswasta dan nirwiraswasta, sehingga variabel *tax Avoidance* (untung rugi menunda pajak) yang sering dihitung wajib pajak wiraswasta tidak

dimasukkan. 3) Penelitian ini menambahkan satu variabel yang belum diteliti sebelumnya yaitu sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus. Variabel ini penting untuk dianalisa karena menyangkut kinerja aparat perpajakan. 4) Alat analisa yang digunakan Suhardito adalah Chi-Square , sementara penelitian ini menggunakan alat analisa regresi berganda, karena disamping ingin menganalisa pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen juga ingin mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama. 5) Pada penelitian ini telah dikemukakan suatu model penelitian perpajakan PBB.

3. Kerangka Pemikiran teoritis

Kerangka pemikiran teoritis untuk menguji hubungan faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB, dapat dijelaskan sbb :

Gambar. 1
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR YANG MELEKAT PADA WAJIB PAJAK
TERHADAP TINGKAT KEBERHASILAN PENERIMAAN PBB



Dari hubungan tersebut dapat dinotasikan dalam model penelitian sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + b_8X_8 + b_9X_9 + b_{10}X_{10} + b_{11}X_{11} + e.$$

Atau $Y = f (X1, X2, X3X11) + e$

Keterangan :

1. Kesadaran Perpajakan WP
2. Rasio beban PBB dibandingkan pendapatan WP.
3. Rasio beda hitung permanent – difference
4. Sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah
5. Pendapat WP tentang pelaksanaan sanksi denda PBB
6. Pendapat WP bahwa penghindaran PBB telah umum
7. Pendapat WP terhadap berat tidaknya beban PBB
8. Pendidikan WP
9. Lama tinggal Wp di lokasi WP
10. Status tanah/rumah WP
11. Pendapat WP terhadap pelayanan fiskus.

Y = Collection Rate

4. Perumusan Hipotesis

Dari latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, tinjauan pustaka, dan tujuan penelitian maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bahwa faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sumber Data

Data berkarakteristik primer dan sekunder. Data sekunder adalah ketetapan dan pelunasan PBB tahun 1996 –2000 dari sampel wajib pajak terpilih. Data sekunder ini diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Bengkulu. Perhitungan data ini menghasilkan informasi variabel terikat yaitu tingkat keberhasilan penerimaan pajak PBB. Data sekunder lainnya yaitu beban PBB dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) menurut fiskus.

Data primer berasal dari jawaban responden antara lain faktor-faktor *disposable income*, tingkat pendidikan, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) menurut responden, lama tinggal WP dan faktor-faktor yang melekat pada WP lainnya, yang nantinya merupakan variabel bebas berjumlah 11 variabel.

2. Populasi dan Prosedur Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yaitu wajib pajak PBB di Kota Bengkulu yang terdaftar dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), juga disebut buku induk berjumlah 54.585 wajib pajak PBB. Prosedur penentuan sampel dengan menggunakan

$$\text{rumus : } n = \frac{Npq}{(N-1)D + pq} \dots\dots\dots (1)$$

$$D = \frac{B^2}{4}$$

(Babbie, Earl, 1983, dalam Bambang Suhardito dan Bambang Sudiby, 1996)

dimana : n = jumlah sampel yang diinginkan

N = populasi

p = oleh karena proporsi awal tidak diketahui maka untuk meminimumkan risiko sampling error dipakai $p = 0,5$

$q = (1 - p) = 0,5$

B = *Bound of error* atau kelonggaran kesalahan diperkirakan ber *interval range* tidak lebih dari 10 % atau 0,1.

$D = (0,1 * 0,1) : 4 = 0,0025$.

Perhitungan ini menghasilkan $n = 99,78$ WP, dibulatkan $n = 100$ Wajib pajak. Sesuai dengan saran peneliti sebelumnya (Bambang Suhardito dan Bambang Sudiby, 1996), maka sampel ditambah 25% dari perhitungan Babbie (rumus 1) tersebut, sehingga menjadi 125 WP. Setelah diketemukan $n=125$ WP, maka selanjutnya ditentukan sampel per kecamatan dengan metode stratifikasi secara proporsional. Setelah diketahui sampel perkecamatan, maka untuk menentukan responden terpilih, digunakan metode pengambilan sampel acak sederhana (dilakukan dengan cara undian). Untuk mengetahui sample terpilih perkecamatan, dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel No. 04 :

PENENTUAN SAMPEL per-KECAMATAN KAB./KOTA BENGKULU

No.	Kecamatan	Populasi (wp)	Proposional	Sampel perkecamatan
1	Teluk Segara	7.956	$(7.956:54585) \times 125$	18
2	Gading Cempaka	29.505	$(29.505:54585) \times 125$	68
3	Muara Bangkahulu	5.823	$(5.823:54.585) \times 125$	13
4	Selebar	11.301	$(11.301:54.585) \times 125$	26
	Jumlah	54.585		125

Sumber : Resume (ringkasan) hasil perhitungan

Metode Pengumpulan Data

Data sekunder dapat diambil langsung di KPPBB Bengkulu. Sedangkan data primer menggunakan alat komunikasi berupa kuesioner. Modus komunikasi dan pengumpulan data primer seperti ini adalah kunjungan (*visite*). Metode pengumpulan data dengan kunjungan (*visite*) ini dapat menjamin tingkat pengembalian questioner dan dapat menjelaskan langsung pada responden apabila ada item-item pertanyaan yang kurang jelas, dengan tidak memberi arahan pilihan jawaban pada responden. Dan oleh karena itulah uji *non respond bias* tidak diperlukan.

Suatu instrumen tidak dapat langsung digunakan sebelum melalui alat uji yang disebut *reliability* dan *validity*.

3.1. Uji Keandalan (Reliability)

Apabila suatu alat ukur memberikan hasil ukur yang stabil, maka disebut alat ukur itu andal (reliability). Hasil ukur itu diterjemahkan dengan koefisien keandalan yaitu derajat kemampuan alat ukur untuk mengukur perbedaan-perbedaan individu yang ada. Keandalan itu perlu, sebab data yang tidak andal atau bias tidak dapat diolah lebih lanjut karena akan menghasilkan kesimpulan yang bias. Bambang sudibyo dalam Bambang Suhardito (1996) menjelaskan dengan baik tentang keandalan dan alat ukur sebagai berikut : Reliability is defined as the degree to which a measurement instrument supplies consistent result (Emory, 1976). A Reliability coefficient demonstrates whether the investigator was correct in expecting the items to yield interpretable statements about individual differences (Cronbach, 1951). The coefficient is an index of the accuracy of the score obtained.

Variabel terikat tingkat keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan ketetapan PBB merupakan data sekunder, dan berasal dari Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan laporan Bank tentang bukti pelunasan pajak di KP PBB Bengkulu. Oleh karena itu tidak ada uji keandalan dan kesahihan data sekunder tersebut. Walaupun demikian penulis telah mengadakan observasi dan mereview sistem administrasi kantor PBB seperlunya, dan dapat dikatakan bahwa sistem tersebut telah dilaksanakan dengan baik, walaupun nantinya ada beberapa saran perbaikan. Artinya data sekunder ini sah dan andal.

3.2. Uji Validity

Kesahihan (validity) suatu alat ukur ialah kemampuan alat ukur itu untuk mengukur apa yang sebenarnya harus diukur, atau dengan perkataan lain alat ukur dapat mengukur indikator-indikator suatu obyek pengukuran. Kesahihan itu perlu sebab prosesing data yang tidak sah atau bias akan menghasilkan kesimpulan bukan dari obyek pengukuran.

Untuk melihat apakah instrumen tersebut valid maka dilakukan uji validitas dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-masing butir pertanyaan terhadap total skor. Apabila korelasi antara skor masing-masing butir terhadap total skor tersebut *significant*, maka data tersebut dinyatakan valid.

Khusus data primer walaupun kuesioner yang digunakan merupakan penyederhanaan dari kuesioner peneliti sebelumnya (Bambang Suhardito dan Bambang Sudiby, 1996) , namun masih perlu diuji Reliabilitas dan Validitasnya. Kedua uji kualitas data tersebut diatas akan dibahas lebih rinci pada Bab IV.

4. Definisi Operasioanal Variabel dan Identifikasi Variabel

4.1. Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tentang konsep dari variabel – variabel penelitiannya adalah sebagai berikut:

WP perbulan ini memakai dasar pendapatan WP rata-rata perbulan pada tahun 2000. Hasil perhitungan ini diasumsikan sebagai rerata rasio selama lima tahun.

6. Beban PBB adalah penetapan pajak tahunan PBB oleh fiskus.
7. Pendapatan WP adalah *disposable income* rata-rata perbulan, yang berelemen belanja untuk pangan, papan/rumah, transportasi, pendidikan, listrik, PDAM (air bersih), telpon dan tabungan.
8. *Permanent-Difference* adalah rasio antara perbedaan perhitungan NJOP Fiskus dengan NJOP WP, dibandingkan dengan perhitungan NJOP Fiskus, untuk tahun 2000. Rasio tahun 2000 ini diasumsikan sebagai rerata rasio *permanent-difference* selama tahun 1996 – 2000.
9. Sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah adalah sikap atau konstelasi komponen yang berinteraksi antara pemahaman, perasaan dan perilaku terhadap makna dan fungsi prioritas pembangunan infra struktur oleh pemerintah daerah. Variabel ini skornya berskala ordinal.
10. Pendapat WP tentang pelaksanaan sanksi denda PBB adalah pandangan responden tentang pelaksanaan sanksi denda PBB terhadap responden sendiri dan orang lain disekitar responden. Variabel ini skornya juga berskala ordinal.
11. Pendapat WP bahwa penghindaran PBB telah umum adalah pandangan responden tentang telah umum atau tidaknya penghindaran pajak PBB di masyarakat sekitar responden. Variabel ini skornya juga berskala ordinal.

12. Pendapat WP terhadap berat tidaknya beban PBB adalah pendapat WP terhadap berat tidaknya beban PBB tahun fiscal 2000. Variabel ini skornya juga berskala ordinal.
13. Variabel pendidikan adalah variabel kategorial berjenjang, dari tingkat tidak sekolah sampai dengan pendidikan S3.
14. Lama tinggal WP di lokasi obyek pajak PBB adalah data dalam tahun yang berjenjang : kurang dari 2 tahun, dua tahun sampai dengan 4 tahun, empat tahun sampai dengan 6 tahun dan lebih dari 6 tahun.
15. Status tanah/bangunan berkategori lima yaitu Kontrak/Sewa; Hak Guna Usaha; Hak Guna Bangunan; Hak Milik; dan lainnya.
16. Sikap WP terhadap pelayanan fiskus adalah sikap atau konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif yang berinteraksi dalam merasakan bagaimana pelayanan fiskus yang sesungguhnya terjadi.

4.2. Identifikasi Variabel

Ada 11 (sebelas) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat.

Tabel nomor 05 berikut ini mengidentifikasi variabel – variabel penelitian sebagai berikut :

Tabel Nomor 05
IDENTIFIKASI VARIABEL – VARIABEL PENELITIAN DAN ANALISIS
STATISTIKNYA

No.	Nama Variabel	Proksi	Skala	Sumber Data	Uji Statistik
A	Variabel Terikat				
01	Tingkat Keberhasilan penerimaan PBB	Pembayaran PBB per Ketetapan PBB	Rasio	KP PBB	-Analisis Statistik Deskriptif -Asumsi klasik -Uji Mahal.Distance -Regresi
B	Variabel Bebas				
01	Kesadaran Perpajakan WP	Kognitif, Afektif dan Konatif	Ordinal	Kuesioner	Uji Analisis Reliability dan Validity. Analisis Deskriptif Uji Mahal.Distance Uji Asumsi klasik Uji Analisis Regresi
02	Rasio beban PBB dibandingkan pendapatan WP	Ketetapan PBB per Pendapatan WP	Rasio	KP PBB dan Kuesioner	Analisis Statistik Deskriptif Uji Mahal.Distance Uji Asumsi klasik Uji Analisis Regresi
03	Beda Perhitungan <i>Permanent Difference</i>	(NJOPF – NJOPR)/NJOPF	Rasio	KP PBB dan Kuesioner	Analisis Statistik Deskriptif Uji Mahal.Distance Uji Asumsi klasik Uji Analisis Regresi
04	Sikap WP terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	Kognitif, Afektif dan Konatif	Ordinal	Kuesioner	Uji Analisis Reliability dan Validity Statistik deskriptif Uji Mahal Distance Uji Asumsi klasik Uji Analisis Regresi
05	Pendapat wp terhadap sanksi denda PBB	Kognitif, Afektif dan Konatif	Ordinal	Kuesioner	Uji Analisis Reliability dan Validity Statistik Deskriptif Uji Mahal Distance Uji Asumsi klasik

					Uji Analisis Regresi
06	Pendapat WP bahwa Penghindaran PBB telah Umum	Kognitif Afektif Konatif	Ordinal	Kuesioner	Analisis Reliability dan Validity Statistik Deskriptif Uji Mahal Distance Uji Asumsi klasik Uji Analisis Regresi
07	Pendapat WP terhadap berat tidaknya beban PBB	Kognitif dan Afektif Konatif	Ordinal	Kuesioner	Uji Reliability dan validity Statistik Deskriptif Uji Mahal.Distance Uji Asumsi klasik Analisis regresi
08	Pendidikan WP	Jenjang pendidikan	Cacah transformasi dari kategorial	Kuesioner	Uji Mahal.Distance Statistik Deskriptif Uji Asumsi klasik Analisis Regresi
09	Lama tinggal WP dilokasi obyek pajak PBB	Lama tinggal	Nominal	Kuesioner	Uji Mahal.Distance Statistik Deskriptif Uji Asumsi klasik Analisis Regresi
10	Status Rumah WP	Status rumah	Ordinal/ Katagorial	Kuesioner	Uji Mahal Distance Statistik Deskriptif Uji Asumsi klasik Analisis Regresi
11	Pendapat WP terhadap pelayanan fiskus	Kognitif dan Afektif	Ordinal	Kuesioner	Uji Reliability dan Validity Statistik Deskriptif Uji Mahal.Distance Uji Asumsi klasik Analisis Regresi

Sumber : Ringkasan (summary).

5. Teknis Analisis Data

Data dianalisis dengan regresi linear dengan langkah-langkah pengolahan sebagai berikut : Data primer dan data sekunder , variabel demi variabel ditabulasikan dengan menggunakan komputer program Microsoft Ekcel.

Variabel-variabel bebas yang berskala ordinal ialah kesadaran perpajakan , sikap wp terhadap prioritas pembangunan Daerah, pendapat wp tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, pendapat wp bahwa penghindaran PBB telah umum, pendapat wp terhadap berat tidaknya beban PBB, dan pendapat wajib pajak terhadap pelayanan fiskus. Serta variabel-variabel bebas penelitian berskala rasio, dalam hal ini variabel-variabel : Tingkat keberhasilan penerimaan PBB, Rasio beban PBB dibandingkan pendapatan wp, Beda perhitungan *permanent difference*. Juga variabel yang berskala nominal ,cacah/kategorial, dalam hal ini variabel-variabel : Pendidikan wajib pajak, lama tinggal wajib pajak, dan status tanah/rumah wajib pajak , keseluruhannya ditabulasikan.

Oleh karena skala pengukuran yang berbeda maka nilai (score) harus di standardized, (kecuali variabel yang sudah berskala rasio) , menjadi skala interval . Karena variabel yang berskala rasio tidak ada pembatasan terhadap alat uji statistik. Kalau skala interval dan rasio digabung , variabelnya disebut variabel metrik. (Imam Ghazali,2001), dan analisa regresi dapat dilakukan. Langkah tersebut sesuai pula buku petunjuk atau *guide* dari (Frank M. Andrews Cs, 1981). Setelah itu diadakan uji Mahalanobis distance, uji Reliability , uji Validity, uji asumsi klasik (Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, Autokorelasi, Normalitas dan Linearitas) dan uji hipotesis.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Responden

Propinsi Bengkulu memiliki luas wilayah 19.788,7 km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.527.721 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 3,63 %. Tingkat kesejahteraan penduduk propinsi Bengkulu pada tahun 1999 berdasarkan nilai nominal Pendapatan Domestik Regional Brutto (PDRB) perkapita sebesar 2,56 juta rupiah mengalami peningkatan sebesar 6,74 % dibandingkan dengan tahun 1998 sebesar 2,40 juta rupiah.

Kinerja perekonomian Propinsi Bengkulu tahun 1999 relatif bergerak naik secara perlahan menuju kearah pemulihan yang ditunjukkan oleh total PDRB atas dasar harga konstan mencapai 1,66 triliun rupiah. Secara riil terjadinya peningkatan kinerja perekonomian tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka 1,61 %. Angka pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi hingga minus 6,27 %. Pada tahun 1999 struktur perekonomian masih tetap didominasi oleh sektor pertanian yaitu sebesar 37,83 % yang diikuti oleh sektor perdagangan 17,72 %, jasa-jasa 14,38 %, pengangkutan dan komunikasi 14,20 % serta sektor lainnya 15,87 %.

Kota Bengkulu merupakan salah satu daerah tingkat II di Propinsi Bengkulu, dengan luas wilayah 144,52 km² atau (0,73 % dari luas Propinsi Bengkulu), dengan penduduk 310.800 jiwa, kepadatan 2.151 per km². Iklim/suhu minimum 24,50 celcius, maksimum 30,55 celcius.

Oleh karena penelitian ini mengarah kepada perpajakan khususnya PBB, maka data yang disajikan gambaran umum responden ini lebih banyak tentang perpajakan.

Tabel nomor 06
LUAS TANAH YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PBB MENURUT
SEKTOR DI KOTA BENGKULU TAHUN 2000.

Nomor	Sektor	Jumlah (Ha)
1	Pedesaan	-
2	Perkotaan	5.586,5
3	Perkebunan	-
4	Kehutanan	-
5	Pertambangan	14.506,19
Total		20.093,4

Sumber : Kantor Pelayanan PBB Bengkulu

1.1. Beban Pajak rata-rata

Seperti telah diuraikan dimuka bahwa responden atau populasi penelitian ini adalah wajib pajak di Kota Bengkulu yang berjumlah 54.585 wp. , yang diwakili oleh 125 responden terpilih. Responden tersebar di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Segara, Gading Cempaka, Muara Bangkahulu dan Selebar. Ketetapan PBBnya sebesar Rp.1.435.444.278,- , sehingga rata-rata ketetapan PBB per wp adalah sebesar Rp.26.297,41.

Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini :

Tabel Nomor 07
JUMLAH WAJIB PAJAK DAN KETETAPAN PAJAK TERHUTANG
Per KECAMATAN di KOTA BENGKULU

Nomor	Kecamatan	Wp	Pajak Terhutang (Rp)	Rata-Rata (Rp)
1	Teluk Segara	7.956	191.878.855	24.117,50
2	Gading Cempaka	29.505	991.426.999	33.601,99
3	Muara Bangkahulu	5.823	54.493.665	9.358,35
4	Selebar	11.301	197.644.759	17.489,14
	Jumlah	54.585	1.435.444.278	26.297,41

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bengkulu (Juni 2001)

1.2. Collection Rate

Kalau dilihat tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dalam kurun waktu 1997/1998 s.d. 2000 rata-rata *collection rate* 56,19 %, untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini :

Tabel nomor 08

COLLECTION RATE KOTA BENGKULU DARI TAHUN 1997/1998 S.D. 2000

No	Tahun	Pokok ketetapan PBB (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	Prosentase (%)
1	1997/1998	705.458	427.059	60,54
2	1998/1999	744.765	464.400	62,36
3	1999/2000	793.575	472.961	59,60
4	2000	1.214.071	513.119	42,26

Sumber : Kantor Pelayanan PBB Bengkulu

1.3 . Tunggakan PBB

Berdasarkan laporan, bulan Juni 2000 rata-rata tunggakan PBB sebesar Rp 212.594,40 pertahun dalam kurun waktu 1996 s.d. 2000, untuk jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel Nomor 09
LAPORAN TUNGGAKAN PBB KANTOR PELAYANAN PBB
(SEKTOR PERKOTAAN) DI BENGKULU TAHUN 1996 S.D. 2000 (RP.000)

Nomor	Tahun	Sisa Tunggakan	Rata-rata
1	1996	257.354	
2	1997	268.398	
3	1998	259.253	
4	1999	245.438	
5	2000	325.290	
		1.355.733	212.594,40

Sumber : Data diolah dari Kantor Pelayanan PBB Bengkulu

2. Profile Responden

Untuk melihat profil responden dapat dilihat dari hasil pengolahan data mengenai statistik deskriptif sbb. :

Tabe Nomor 10
STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	125	23,3509	38,0503	31,701216	2,994930
X2	125	,001216260163	,211200000000	2,59743191E-02	3,3086175E-02
X3	125	-,980198019802	,351600897384	-,19599092002888	,23812429091392
X4	125	12,4905	25,2232	19,313458	2,337310
X5	125	4,0000	13,2430	9,936991	2,149671
X6	125	6,1816	16,7020	12,466479	2,217549
X7	125	1,884	6,475	3,76686	,85482
X8	125	1,84583	6,47500	3,8438079	,8531019
X9	125	1,0000	3,7301	3,397798	,652573
X10	125	1	3	2,82	,81
X11	125	11,153	20,703	16,35517	1,96632
Y	125	,222921718771	1,000000000000	,78075349682194	,18503342615977
Valid N (listwise)	125				

Sumber : Ouput SPSS (standardized).

Ada beberapa variabel yang perlu dijelaskan dalam statistik deskriptif yaitu :

2.5. Lama Tinggal Wajib Pajak

Rata-rata responden wajib pajak telah bertempat tinggal selama lebih dari 6 tahun, (dalam analisa deskriptif mean= 3,39) untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini :

Tabel Nomor 12
LAMA TINGGAL WAJIB PAJAK

Nomor	Lama Tinggal	Jumlah
1	Kurang dari 2 tahun	7
2	2 tahun s.d. 4 tahun	12
3	4 tahun s.d. 6 tahun	22
4	Lebih dari 6 tahun	84
	Jumlah	125

Sumber : Jawaban Responden

2.6. Pendapat an wp

Untuk mengetahui pendapatan wajib pajak di jaring lewat pertanyaan *disposable income* berapa belanja (pengeluaran) perbulan. Dari data yang diterima rata-rata pendapatan perbulan responden (wajib pajak) sebesar Rp.2.177.828,-

2.7. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)

Menurut responden Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah/bangunan tempat tinggal rata-rata sebesar Rp.65.040.000,-, senentara menurut fiskus rata-rata NJOP sebesar Rp.56.315.040,-

2.8. Collection-Rate

Untuk mengetahui *collection rate* responden dengan jalan membandingkan realisasi pembayaran PBB selama 5 tahun (1996 s.d. 2000) dengan ketetapan PBB selama 5 tahun (1996 s.d. 2000). Rata-rata *collection rate* responden adalah 0,7807534.

Untuk jelasnya lihat tabel berikut ini :

Tabel nomor 13
COLLECTION RATE RESPONDEN TAHUN 1996-2000

Nomor	Keterangan	Jumlah (Rp)	Rata-rata resp.	%
1	Ketetapan PBB	29.741.634,00	237.933,072	
2	Realisasi PBB	22.523.587,00	180.188,-	
3	Collection Rate	-	-	0,7807534

Sumber : Kantor Pelayanan PBB Bengkulu

3. Uji Outlier

Untuk melihat apakah ada atau tidak jawaban responden yang out lier, maka diuji dengan Mahalanobis distance. Ternyata dari uji ini dari 125 responden, ada 6 responden yang terpaksa tidak diikutkan dalam analisa selanjutnya yaitu nomor responden : 31, 32, 53, 62, 63, 88 , sehingga responden yang diikut sertakan dalam perhitungan sebanyak 119.

4. Uji Kualitas Data

4.1. Uji Reliability

Tabel No. 14

HASIL CRONBACH-ALPHA MASING-MASING VARIABEL

notasi Variabel	Nama Variabel	Butir	Alpha	Keterangan
(X1)	Kesadaran Perpajakan	10	0,8926	Andal
(X4)	Sikap wp terhadap pembangunan daerah	6	0,8467	Andal
(X5)	Pendapat wp terhadap sanksi denda	4	0,7862	Andal
(X6)	Pendapat wp tentang penghindaran PBB telah umum	5	0,8355	Andal
(X11)	Pendapat wp terhadap pelayanan fiskus	5	0,8495	Andal

Sumber : Output SPSS (lampiran 9 s.d.13)

Dari tabel tersebut masing-masing variabel mempunyai cronbach-alpha $> 0,70$ maka menurut (Nunnally,1994) pengujian menunjukkan bahwa instrumen cukup andal.

4.2. Uji Validity

Kesahihan (validity) suatu alat ukur ialah kemampuan alat ukur itu untuk mengukur apa yang sebenarnya harus diukur, atau dengan perkataan lain alat ukur dapat mengukur indikator-indikator suatu obyek pengukuran. Kesahihan itu perlu sebab prosesing data yang tidak sah atau bias akan menghasilkan kesimpulan bukan dari obyek pengukuran.

Untuk melihat apakah instrumen tersebut valid atau tidak maka dilihat tingkat signifikansi korelasi antar sekor terhadap total sekor.

Untuk itu perhatikan tabel berikut ini :

Tabel No. 15

HASIL UJI VALIDITAS

No.	Variabel	Item	Interval korelasi
1	Kes.Perpajakan	10	0,580-0,815
2	Sikap wp terhadap pembangunan daerah	6	0,674-0,824
3	Pendapat wp terhadap sanksi denda	4	0,695-0,838
4	Pendapat wp terhadap pelayanan fiskus	5	0,680-0,892
5	Pendapat wp tentang penghindaran PBB telah umum	5	0,687-0,863

Sumber : Output SPSS (lampiran 4 s.d. 8)

Dari masing-masing variabel yang perlu diuji tersebut diatas berarti kesemuanya menunjukkan korelasi positif pada tingkat signifikansi 0,01 dan 0,05 dengan demikian data tersebut valid.

5. Uji Asumsi Klasik

5.1. Uji Autokorelasi

Uji outokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dan periode sebelumnya. Uji ini menggunakan Uji Durbin-Watson (DW Test)

Hasil Out put SPSS (lampiran 1) menunjukkan seperti tabel nomor 16 berikut ini :

Tabel Nomor 16
OUTPUT SPSS DURBIN-WATSON (DW)

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,950 ^a	,903	,893	5,7655986E-02	1,756

a. Predictors: (Constant), X11, X7, X2, X9, X6, X5, X3, X1, X8, X4, X10

b. Dependent Variable: Y

Pengambilan keputusan apakah ada atau tidaknya autokorelasi dengan ketentuan : Apabila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan ($4-du$), maka koefisien autokorelasi=0, berarti tidak ada autokorelasi, (Imam Ghozali,2001). Dari output SPSS nilai DW=1,756 dimana nilai du untuk $n=119$ dan $k=11$ adalah 1,72 dan ($4-du$) = 2,28. Sehingga nilai DW=1,756 tersebut terletak antara 1,72 dan 2,28 dengan kata lain tidak terdapat autokorelasi.

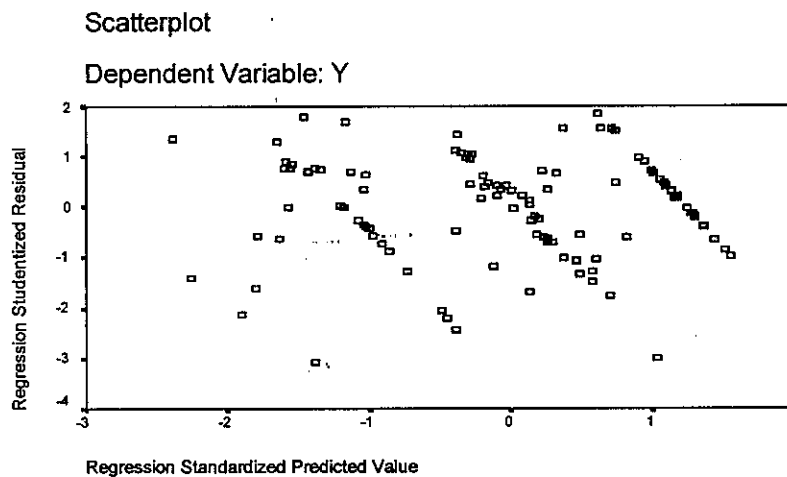
5.2. Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk menguji model regresi apakah ada atau tidak korelasi antar variabel bebas. Menurut Imam Ghozali (2001), jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Dari hasil output spss (lampiran 3), dimana besaran korelasi antar variabel bebas tampak bahwa tidak satu variabel pun yang koefisien korelasinya diatas 0,90. Oleh karena korelasi ini masih dibawah 0,90 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Uji lain dilakukan dengan nilai tolerance (lampiran 1) tidak satu variabelpun yang mempunyai nilai tolerance kurang dari 10 % (0,10). Nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan tidak ada satu variabel bebas yang memiliki VIF lebih dari 10. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai tolerance terendah 0,10 dan VIF diatas 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas.

5.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dari output SPSS Scatterplot dapat ditampilkan grafik/gambar sebagai berikut :

Gambar/Grafik nomor 2 : GAMBAR SCATTERPLOT



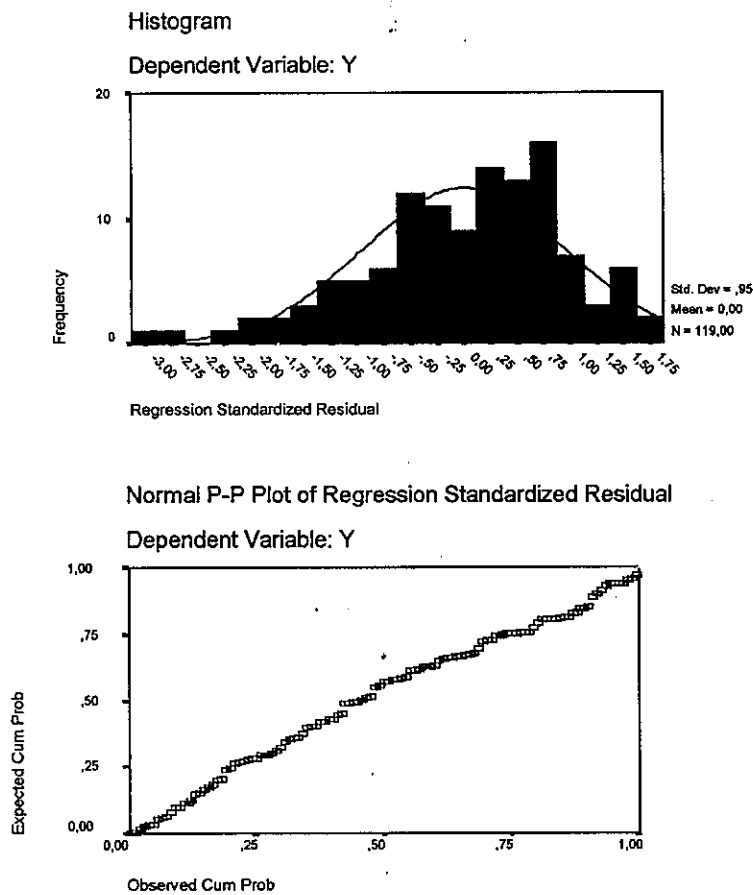
Dari grafik scatterplot tersebut terlihat titik titik menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

5.4. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Hasil output SPSS Normal Probability plots (lampiran 2) dapat ditampilkan sbb. :

Gambar/histogram nomor 3 :

NORMAL PROBABILITY PLOTS



Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal plot dapat disimpulkan bahwa grafik memberikan pola distribusi normal. Karena histogram hampir menyerupai genta dan titik variance semuanya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

5.5. Uji Linearitas

Uji ini untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linear, kuadrat atau kubik. Untuk uji ini digunakan Ramsey Test.

Dengan asumsi , H_0 : Model dalam bentuk fungsi linear

H_a : Model dalam bentuk non linear

Dengan kriteria : H_0 diterima apabila F hitung $<$ F tabel.

Dari hasil output SPSS model Ramsey Test (lampiran 15) didapati Adjusted R Square (R^2 new)= 0,976 sementara hasil output SPSS sebelumnya (lampiran 1) didapati Adjusted R Square (R^2 old) = 0,893

Kemudian dapat dihitung F statistik dengan rumus (Imam Ghozali,2001) sbb. :

$$F = \frac{R^2 \text{New} - R^2 \text{Old} / m}{(1 - R^2 \text{New}) / (n - k)} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana : m = jumlah variabel bebas yang baru masuk

n = jumlah data observasi

k =banyaknya parameter dalam persamaan baru

R^2 new = nilai R^2 dari persamaan regresi baru

R^2 old = nilai R^2 dari persamaan regresi awal

Dari perhitungan tersebut didapati F hitung = 0,036.

Nilai F hitung = 0,036 dibandingkan dengan nilai F tabel pada df (119-12) dan pada n = 12 adalah 2,35. Jadi F hitung $<$ F tabel, maka H_0 tidak dapat ditolak atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa model regresi adalah linear.

6. Uji Hipotesis

Faktor –faktor yang melekat pada wp yang pertama adalah kesadaran perpajakan sebagai salah satu contoh variabel bebas penelitian, yang berskala ordinal telah dihipotesiskan sebagai berikut :

Faktor kesadaran perpajakan wp berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Secara keseluruhan langkah-langkah pembuktian hipotesis ini diawali dengan mengkonversikan hipotesis penelitian menjadi hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho : Kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Ha : Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Langkah kedua menetapkan taraf keyakinan. Dalam penelitian ini penulis menetapkan taraf keyakinan adalah 95 %, atau peluang ralatnya bernilai 5 % (nilai $p=0,05$).

Tahap ketiga menentukan kriteria penerimaan Ho dan penolakan Ho sbb :

Ho diterima jika : nilai $p \geq 0,05$ dan menolak Ha atau dengan kata lain nilai p tidak andal.

Ho ditolak jika : nilai $p < 0,05$ dan menerima Ha atau dengan kata lain nilai p andal.

Selanjutnya langkah keempat adalah menarik kesimpulan :

Apabila nilai P andal, dapat ditarik kesimpulan variabel kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Atau sebaliknya, bila nilai p tidak andal, dapat ditarik kesimpulan variabel kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat keberhasilan penerimaan PBB, dengan asumsi faktor-faktor lain konstan (*ceteris paribus*)

Proses uji untuk variabel-variabel lainnya sama dengan contoh pengujian variabel kesadaran perpajakan (X_1) tersebut diatas.

Adapun ringkasan hasil output SPSS (lampiran 1) dapat ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel Nomor 17
KOEFSIEN REGRESI DAN SIGNIFIKANSI

Nama Variabel	Koefisien Regresi (Beta)	Signifikansi/keterangan
1. Kesadaran perpajakan	0,84	0,046 / terbukti
2. Rasio Beban PBB dibandingkan dengan pendapatan wp.	-0,062	0,050 / terbukti
3. Rasio Beda hitung <i>permanent difference</i>	0,066	0,073 / tidak terbukti
4. Sikap wp terhadap pembangunan daerah	0,240	0,000 / terbukti
5. Sikap wp terhadap sanksi denda	0,123	0,001/ terbukti
6. Pendapat wp tentang penghindaran PBB telah umum	0,068	0,050/ terbukti
7. Pendapat wp tentang berat tidaknya beban PBB	0,049	0,138/ tidak terbukti
8. Pendidikan wp	0,206	0,000/ terbukti
9. Lama tinggal wp	0,017	0,599/ tidak terbukti
10. Status tanah/rumah wp	0,136	0,004/ terbukti
11. Pendapat wp terhadap pelayanan fiskus	0,303	0,000/ terbukti

Sumber : Output SPSS (lampiran 1)

Dari hasil output SPSS tersebut juga dapat dibuat persamaan regresi sbb:

$$Y = 0,084X_1 - 0,062X_2 + 0,066X_3 + 0,240X_4 + 0,123X_5 + 0,068X_6 + 0,049X_7 + 0,206X_8 + 0,017X_9 + 0,136X_{10} + 0,303X_{11} + e.$$

Untuk melihat variabel mana yang berpengaruh dan variabel mana yang tidak berpengaruh dapat dilihat pada kolom signifikansi, maka akan diuraikan satu persatu variabel sebagai berikut:

6.1. Kesadaran Perpajakan (X1)

Hipotesis penelitian berbunyi: Kesadaran perpajakan wp berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Dari hipotesis penelitian dikonversikan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho : Kesadaran perpajakan wp tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Ha : Kesadaran Perpajakan wp berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Dari hasil analisa regresi linier, tingkat signifikansi atau peluang ralat untuk variabel X1 (kesadaran perpajakan) adalah $P = 0,046$, berdasarkan kriteria dimana :

Ho diterima apabila $P > 0,05$. Oleh karena nilai $P = 0,046 < P = 0,05$, maka Ho ditolak dan menerima Ha. Dengan kata lain kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

6.2. Rasio beban PBB di bandingkan pendapatan WP (X2)

Hipotesa Penenelitian berbunyi:

Rasio beban PBB dibandingkan pendapatan WP berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu. Dari hipotesis penelitian dikonversikan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho : Rasio beban PBB dibandingkan pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Ha : Rasio beban PBB dibandingkan pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Dari hasil analisis regresi peluang ralat untuk variabel X2 adalah : $P=0,050$. Sesuai dengan kriteria, Ho diterima apabila $P>0,05$. Oleh karena nilai $P=0,050<$ atau sama dengan $P=0,05$ maka Ho ditolak dan menerima Ha, atau dengan kata lain rasio beban PBB dibandingkan pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

6.3. Rasio beda hitung permanent-difference (X3)

Hipotesis penelitian berbunyi :

Rasio beda hitung *permanent-difference* berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Dari hipotesis penelitian dikonversikan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho : Rasio beda hitung *permanent-difference* tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Ha : Rasio beda hitung *permanent-difference* berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Dari hasil analisis regresi peluang ralat untuk variabel X3 adalah $P=0,073$. Sesuai dengan kriteria yang ditentukan dimana H_0 diterima jika $P>0,05$. Oleh karena nilai $P=0,073 > p=0,05$ maka H_0 diterima dan menolak H_a . Artinya, Rasio beda hitung *permanent-difference* tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

6.4. Sikap WP terhadap pembangunan daerah (X4)

Hipotesis penelitian berbunyi :

Sikap WP terhadap pembangunan daerah berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Dari hipotesis penelitian dikonversikan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut :

H_0 : Sikap WP terhadap pembangunan daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

H_a : Sikap WP terhadap pembangunan daerah berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Dari hasil analisis regresi, peluang ralat untuk variabel X4 $P = 0,000$. Sesuai dengan kriteria yang ditentukan dimana : H_0 diterima jika $P>0,05$. Ternyata $P=0,000 < P=0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a . Artinya, sikap WP terhadap pembangunan daerah berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

6.5. Sikap WP terhadap sanksi denda PBB (X5)

Hipotesis penelitian berbunyi :

Sikap WP terhadap sanksi denda PBB berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Dari hipotesis penelitian dikonversikan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho : Sikap WP terhadap sanksi denda PBB tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Ha : Sikap WP terhadap sanksi denda PBB berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Adapun kriteria yang ditentukan adalah H_0 diterima apabila $P > 0,05$. H_0 ditolak apabila $P < 0,05$. Dari hasil analisis regresi ternyata peluang ralat untuk X_5 $P = 0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, sikap WP terhadap sanksi denda PBB berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

6.6. Pendapat WP tentang penghindaran PBB telah umum (X_6)

Hipotesis penelitian berbunyi :

Pendapat WP tentang penghindaran PBB telah umum berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Dari hipotesis penelitian dikonversikan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho : Pendapat WP tentang penghindaran PBB telah umum tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Ha : Pendapat WP tentang penghindaran PBB telah umum berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Adapun kriteria yang ditentukan adalah H_0 diterima jika $P > 0,05$ dan H_0 ditolak jika $P < 0,05$. Dari hasil analisis regresi ternyata peluang ralat untuk X_6 , $P = 0,050 <$ atau sama dengan $P = 0,05$. Maka H_0 diolak dan menerima H_a . Artinya,

Pendapat WP tentang penghindaran PBB telah umum berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

6.7. Pendapat WP tentang berat tidaknya beban PBB (X7)

Hipotesis penelitian berbunyi :

Pendapat WP tentang berat tidaknya beban PBB berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Dari hipotesis penelitian dikonversikan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho : Pendapat WP tentang berat tidaknya beban PBB tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Ha : Pendapat WP tentang berat tidaknya beban PBB berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Adapun kriteria yang ditentukan adalah Ho diterima jika $P > 0,05$ dan Ho ditolak jika $P < 0,05$. Dari hasil analisis regresi ternyata peluang ralat untuk X7, $P = 0,138 > P = 0,05$. Maka Ho diterima dan menolak Ha. Artinya, pendapat WP tentang berat tidaknya beban PBB tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

6.8. Pendidikan wajib pajak (X8)

Hipotesis penelitian berbunyi :

Pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Dari hipotesis penelitian dikonversikan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho : Pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Ha : Pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu..

Adapun kriteria yang ditentukan adalah Ho diterima jika $P > 0,05$ dan Ho ditolak jika $P < 0,05$. Dari hasil analisis regresi ternyata peluang ralat untuk X8, $P = 0,000 < P = 0,05$. Maka Ho ditolak dan menerima Ha. Artinya, Pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

6.9. Lama tinggal wajib pajak (X9)

Hipotesis penelitian berbunyi :

Lama tinggal wajib pajak PBB berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Dari hipotesis penelitian dikonversikan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho : Lama tinggal wajib pajak PBB tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Ha : Lama tinggal wajib pajak PBB berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Adapun kriteria yang ditentukan adalah Ho diterima jika $P > 0,05$ dan Ho ditolak jika $P < 0,05$. Dari hasil analisis regresi ternyata peluang ralat untuk X9, $P = 0,599 > P = 0,05$. Maka Ho diterima dan menolak Ha. Artinya, Lama tinggal wajib pajak PBB tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

6.10. Status tanah/rumah (X10)

Hipotesis penelitian berbunyi :

Status tanah/rumah berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Dari hipotesis penelitian dikonversikan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho : Status tanah/rumah tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Ha : Status tanah/rumah berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Adapun kriteria yang ditentukan adalah Ho diterima jika $P > 0,05$ dan Ho ditolak jika $P < 0,05$. Dari hasil analisis regresi ternyata peluang ralat untuk X10, $P = 0,004 < P = 0,05$. Maka Ho ditolak dan menerima Ha. Artinya, Status tanah/rumah berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

6.11. Pendapat WP terhadap pelayanan fiskus (X11)

Hipotesis penelitian berbunyi :

Pendapat WP terhadap pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Dari hipotesis penelitian dikonversikan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut :

Ho : Pendapat WP terhadap pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Ha : Pendapat WP terhadap pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Adapun kriteria yang ditentukan adalah H_0 diterima jika $P > 0,05$ dan H_0 ditolak jika $P < 0,05$. Dari hasil analisis regresi ternyata peluang ralat untuk X_{11} , $P = 0,000 < P = 0,05$. Maka H_0 ditolak dan menerima H_a . Artinya, pendapat WP terhadap pelayanan fiscus berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

7. Pembahasan dan Implikasi Hasil Penelitian

7.1. Faktor Kesadaran Perpajakan telah terbukti berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu. Hal ini logis karena menurut Saifudin Azwar (1988) ketika komponen kognitif berupa apa yang dipercayai oleh subyek pemilik sikap, komponen afektif merupakan komponen yang menyangkut aspek emosional dan komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh subyek, maka seorang wp sadar bahwa harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sehingga mendorong seorang wp untuk membayar kewajibannya berupa pajak PBB setiap tahun. Dorongan ini semakin kuat berarti akan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak dan implikasinya akan meningkatkan *collection rate*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya (Bambang Suhardito dan bambang sudibyo, 1996).

7.2. Faktor Rasio Beban PBB dibandingkan dengan pendapatan wp telah terbukti berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu. Hal ini dapat diterima karena apa yang dibayarkan oleh wp untuk pajak PBB tersebut memang bersumber dari penghasilan wp itu sendiri. Dengan demikian pendapatan

wp akan mempengaruhi tingkat ketaatannya membayar pajak dan dengan demikian juga akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB. Hubungan antara tingkat keberhasilan PBB dengan pendapatan telah dibuktikan oleh penelitian (Guritno, 1994) yang menyimpulkan bahwa adanya hubungan fungsional antara pembayaran PBB dengan nilai tanah, nilai rumah dan pendapatan wajib pajak.

7.3 Faktor Rasio Beda Hitung *Permanent-Difference* telah terbukti tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu. Memang logikanya semakin tinggi nilai NJOP oleh fiskus maka akan semakin tinggi pula jumlah pajak PBBnya. Semakin besar pajak PBBnya ada kecenderungan wp tidak sanggup membayarnya. Tetapi dalam hal ini tidak berlaku bagi wp PBB di Bengkulu. Karena bagi mereka prinsip keadilan yang sangat mengemuka. Apabila tanah dan rumah dianggap mereka sama ukuran dan konstruksinya tetapi penetapan pajaknya berbeda mereka merasa keberatan dan menunda pembayaran pajaknya. Perbedaan fiskus dengan wp adalah perbedaan perhitungan NJOP. WP memakai dasar transaksi jual beli yang terjadi di blok atau zone yang bersangkutan sementara fiskus berdasarkan nilai buku. Dalam hal ini mendukung penelitian terdahulu (Bambang Suhardito dan Bambang Sudibyo, 1996) bahwa untuk wajib pajak PBB secara umum memang tidak berpengaruh. Tetapi untuk wajib pajak wiraswasta terdapat hubungan yang signifikan.

7.4. Faktor Sikap Wp Terhadap Pembangunan Daerah telah terbukti berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu. Hal ini dapat diterima karena wp telah mengorbankan sejumlah uang tertentu dengan harapan mendapatkan imbalan berupa pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan

dan lain-lain. Loekman Soetrisno (1994) menyatakan bahwa layanan pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi ketaatan pembayaran pajak PBB, khususnya wp perkotaan. Sebaliknya apabila pemerintah tidak merelisasikan pembangunan di daerahnya, maka ketaatan pembayaran pajak akan menurun.

7.5. Faktor Pendapat Wp Terhadap Sanksi Denda telah terbukti berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu. Hal ini logis karena masyarakat akan mematuhi pembayaran PBBnya bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Pada penelitian terdahulu (Bambang Suhardito dan Bambang Sudiby, 1996) juga menyatakan terbukti berpengaruh untuk wp wiraswasta dan nirwiraswasta.

7.6. Faktor Pendapat Wp Bahwa Penghindaran PBB Telah Umum terbukti berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Kota Bengkulu.

Hal ini dapat diterima karena masyarakat mengetahui bahwa masih banyak tetangganya yang tidak taat membayar pajak, tetapi sanksi denda tidak pernah diterapkan. Sehingga masyarakat menganggap membayar atau tidak sama saja, bahkan yang taatpun tidak pernah mendapat hadiah.

Pandangan masyarakat seperti ini menyebabkan mereka menghindari pembayaran PBB. Dalam penelitian terdahulu secara empiris tidak terbukti. Hal ini sedikit ada perbedaan karena bukan penghindaran yang menjadi titik perhatian tetapi ketidakadilan perpajakan akan menyebabkan merosotnya bahkan hilangnya kepatuhan para wajib pajak. Seorang wp tidak akan menghindar dari kewajibannya

jika ada keadilan terutama dalam penentuan NJOP, dan transparansi penggunaan dana pajak PBB tersebut.

7.7 Faktor Pendapat wp terhadap berat tidaknya beban PBB telah terbukti tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu. Hal ini dapat diterima karena bukan masalah berat atau ringannya beban pajak tersebut melainkan faktor keadilan yang diutamakan, terutama dalam menentukan NJOPnya. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya (Bambang Suhardito dan Bambang Sudibyo, 1996).

7.8. Faktor Pendidikan terbukti berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu. Hal ini didukung oleh pendapat Guritno (1994) yang mengatakan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak harus dibina melalui pengetahuan dan pendidikan masyarakat.

7.9. Faktor Lama Tinggal Wp telah terbukti tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu. Dalam penelitian terdahulu, Bambang Suhardito dan Bambang Sudibyo (1996) menyimpulkan bahwa memang tidak terbukti untuk wp wiraswasta dan terbukti ada pengaruh untuk wp nir-wiraswasta.

7.10. Faktor status tanah/rumah telah terbukti berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu. Hal ini logis karena wp lebih merasa aman apabila tanah/rumah tersebut adalah hak milik, bukan sewa, kontrak dan lain sebagainya. Sehingga kalau wp merasa aman maka akan lebih termotivasi untuk

membayar PBB dan akan meningkatkan collection ratenya. Hal ini mendukung penelitian (Guritno,1994).

7.11. Faktor Pendapat wp terhadap Pelayanan Fiskus terbukti berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu.

Hal ini dapat diterima karena kalau fiskus tidak memberikan pelayanan yang baik maka ada kecenderungan wp akan melalaikan kewajibannya. Sebaliknya kalau pelayanan fiskus baik dalam artian cepat, tepat dan adil maka ada kecenderungan wp akan mentaati kewajibannya. Hal ini senada dengan apa yang pernah disampaikan oleh Dr.Sri Adiningsih (Suara Merdeka,10 Oktober 2000) bahwa kualitas pelayanan pemerintah dalam hal ini fiskus mempengaruhi tingkat ketaatan wp membayar pajaknya, lebih lanjut Adiningsih menguraikan memang disiplin pajak di Republik ini rendah sekali dan aparatnya juga lemah. Padahal ruang gerak untuk meningkatkan penerimaan pajak sebenarnya masih cukup tinggi. Masalahnya pembayaran pajak masih banyak yang bisa dinegosiasikan dan itu merupakan salah satu refleksi KKN yang tinggi. Maka disiplin pajak harus betul-betul ditegakkan , dan dimulai dari kalangan aparat pajak.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran peneliti dan praktisi. Oleh karena itu bab ini diorganisaikan dalam sub-sub kesimpulan , keterbatasan dan saran.

1. Kesimpulan

Sampel penelitian terdiri dari seratus dua puluh lima (125) wajib pajak PBB terdistribusi di 4 kecamatan di Kota Bengkulu.

Variabel penelitian sebanyak sebelas (11) variabel bebas dan satu variabel terikat. Penarikan hipotesis penelitian berdasarkan nilai peluang ralat masing-masing variabel bebas (p value) sebesar 5 %. Dari hasil analisis regresi ternyata ada 8 (delapan) variabel bebas yang terbukti berpengaruh terhadap variabel terikat dengan tingkat keyakinan (convident interval) sebesar 95%. Variabel sisanya tidak berarti tidak berpengaruh sama sekali tetapi pengaruhnya tidak significant. Dilihat dari nilai *Adjusted R Square* =0,893 berarti 89,3 % variabel bebas (sebelas faktor yang melekat pada wajib pajak yang di hipotesiskan) dapat menjelaskan secara bersama-sama variabel terikat (Tingkat Keberhasilan Penerimaan PBB di Kota Bengkulu), sedangkan 10,7 % sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dan tidak berpengaruh secara significant dapat diuraikan berikut ini :

1. Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu.

2. Rasio beban PBB dibandingkan pendapatan wp telah terbukti berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu.
3. Rasio beda hitung *permanent-difference* tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu.
4. Sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu.
5. Sikap wajib pajak terhadap sanksi denda PBB berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu.
6. Pendapat wajib pajak tentang penghindaran PBB telah umum berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu.
7. Pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PBB tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu.
8. Pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu.
9. Lama Tinggal wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu.
10. Status tanah/rumah wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu.
11. Pendapat wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB di Bengkulu.

2. Keterbatasan

Beberapa keterbatasan yang dirasakan cukup mengganggu pada penelitian ini adalah :

(1) Model yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah suatu model yang telah teruji didalam penelitian sebelumnya. Model ini dirancang melalui dasar teoritis dan hasil penelitian terdahulu. Model penelitian ini dibangun atas dugaan yang kuat akan pengaruh variabel-variabel yang dihipotesiskan. (2) Tujuan riset dibidang akuntansi keperilakuan umumnya adalah untuk memprediksi dan menjelaskan suatu fenomena perilaku yang terjadi atau memungkinkan terjadi , namun diakui bahwa sangat sulit untuk memprediksi perilaku dengan derajat yang tinggi. Dalam kasus penelitian ini misalnya berapa ukuran kenaikan “kesadaran perpajakan” yang mempengaruhi kenaikan *collection rate*, secara kuantitatif sangat sulit. (3) Random sampling tidak sepenuhnya diterapkan, sehingga sampel mungkin tidak menggambarkan populasi yang sebenarnya. Juga dengan sampel yang sedikit membatasi untuk generalisasi hasil penelitian ini. (4) Walaupun metode survey dilakukan dengan visite tidak menutup kemungkinan responden bisa tidak jujur.

3. Saran

3.1. Saran Untuk Peneliti

Penelitian ini perlu ditindak lanjuti, karena walaupun dalam penelitian ini sudah dikemukakan model perpajakan , namun masih perlu *test and re test* untuk menguji hasil penelitian ini. Tindak lanjut penelitian dapat berupa penelitian lanjutan maupun replikasi. Bila melakukan penelitian lanjutan dapat memasukkan variabel-variabel lain seperti falsafah keadilan perpajakan PBB, kemudian elemen keberhasilan perpajakan

pajak PBB lainnya seperti kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Bila penelitian dilakukan penelitian replikasi maka disarankan dapat menambah variabel dan menambah sampel penelitian, menyempurnakan alat uji statistik, dan menyempurnakan kuesioner.

3.2. Saran Untuk Praktisi

Fiskus selaku aparat yang paling bertanggung jawab terhadap masalah perpajakan, harap memperhatikan dan memanfaatkan penelitian ini untuk : 1) Oleh karena kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB, maka perlu penyuluhan yang menyangkut kesadaran perpajakan dan kesadaran bernegara. 2).Pemerintah daerah hendaknya berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat terlebih dahulu, baru kemudian membuat kebijakan perpajakan. 3). Oleh karena rasio beda hitung permanent difference tidak signifikan, maka penetapan NJOP perlu keadilan, bukan beda hitung permanen yang menjadi perhatian wajib pajak. 4). Hasil pungutan PBB hendaknya benar-benar digunakan untuk pembangunan daerah. 5). Sanksi denda hendaknya benar-benar diterapkan. 6). Untuk mengantisipasi anggapan penghindaran PBB telah umum, maka perlu ketegasan penerapan Undang-Undang PBB. 7). Oleh karena berat tidaknya beban PBB tidak signifikan, diharapkan ketelitian dan keadilan dalam menetapkan pajak terhutang perlu diutamakan, bukan berat atau tidaknya beban PBB. 8). Kiranya pendidikan masyarakat harus tetap ditingkatkan. 9). Kiranya Pemda setempat dapat mempermudah dalam pengurusan status tanah/rumah. 10. Fiskus hendaknya meningkatkan mutu pelayanan terhadap wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, Frank M (1981). *Aguide For Selecting Statistical Techniques For Analyzing Social Science Data*. Second Edition, Michigan: Institute For Social Research, The University of Michigan.
- Achmad Syarifudin, 1992. *The effects of the 1983 Indonesian Tax on the Effective Tax Rate on Capital*, Blooming Com, Indiana University, Disertasi S3.
- Accounting Principle Board (APB),1970. *Basic Concept and Accounting Principles Underlying Financial statement of Business Enterprise*. New York: APB, Statement of the Accounting standard Board No.4.
- Arifin Sabeni dan Imam Ghozali, 1988, *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*, Yogyakarta,BPFE.
- Badan Pengawas Keuangan (BAPEKA) , Panitia Kerja Penyusunan Pedoman dan Program Audit standar Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 1991. *Petunjuk Pemeriksaan atas Pajak Bumi dan Bangunan*, Jakarta, Proyek Penyempurnaan Auditing Pemerintah I (BALAKA).
- Babbie, Earl, 1983. *The Practice of social Researh*, 3rd Ed, Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.
- B. Usman dan K.Subroto, 12980. *Pajak-Pajak Indonesia*, Cetakan ke II. Jakarta, Yayasan Bina Pajak
- Bambang Sudibyo, 1985, *The Adequacy of CPAS' Understanding of The Relative Seriousness of Alpha and Beta Risk in Statistical Audit Sampling*, Lexington, Kentucky : The University of Kentucky, Disertasi S3.
- Bambang Suhardito dan Bambang Sudibyo, 1996. *Pengaruh Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan*, Tesis Pascasarjana UGM.
- Djamaludin Ancok, 1992. *Teknik Penyusunan Skala Pengukur*, Yogyakarta, Penerbit Liberty.
- Eko Lasmana, , 1989. *Pengantar Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Balai Penerbit Universitas Tarumanegara.
- F.X .Yuwono Prawiro Setoto, ,1989. *Tinjauan Aspek Mikro dan Makro Kebijakan Keuangan Negara di Indonesia*, Jurnal Keuangan dan Moneter, Volume 1 no.2 hal.63-86.
- Fuad Bawazier, , 1993. Key-notes Speaker pada : *Seminar Peran Pajak Dalam Peningkatan Ekspor*, Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.

- Friedman, Laurence M. 1984. *American Law*. London: W.W. Norton & Company.
- Erman Rajagukguk. 1993. *Pembaharuan hukum PJPT Kedua dalam era globalisasi*. Surabaya: Kongres XII.
- Guritno Mangkoesobroto, 1992. *Pointers: Tantangan dan Prospek Pengumpulan Pajak Sebagai sumber Pembiayaan Pembangunan*, dalam seminar sehari tantangan dan prospek pembangunan ekonomi Indonesia dalam era PJPT II, Yogyakarta Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Guritno Mangkoesobroto, , dan Tony Prasetyanto (Ed), 1994. *Kebijakan EkonoI Publik di Indonesia: Subsistensi dan Urgensi*, Kumpulan tulisan Dr.Guritno Mangkoesobroto, Jakarta: Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Hadi Sutrisno, dan seno Pamardiyanto (KO-Editor), 1991. *Analisis Butir untuk Instrumen Angket, Tes dan Skala Nilai dengan Basica*, Yogyakarta, Penerbit Andi Offset.
- Imam Ghozali ,2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kelly, Roy, 1993. *Property Tax Reform in Indonesia: Aplying a Collection-Led Implementation strategi*, Australian National University, Canberra: Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES), Vol.29, No.1 April 1993.
- Karsono Suryowibowo, 1989, *Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Prospekti*, Jakarta : Jurnal Keuangan Dan Moneter, Vol.1 nomor 2 Oktober 1989.
- Loekman Soetrisno, 1994, *Optimalisasi Pemungutan PBB di Perkotaan: Suatu perspektif Sosiologis*: Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak, Diskusi terbatas “ Penyempurnaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan serta Pemungutan Kembali Bea Balik Nama tanah atas Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan”.
- M. Suparmoko 1992, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, ed 4. Yogyakarta: BPFE.
- Masri Singarimbun, dan Sofian Effendi (Ed), 1989, *Metode Penelitian Survey*, edisi revisi, Jakarta : LP3ES.
- Nunnaly, J.C & Berustein, I.H, 1994. *Psychometric Theory*, McGrawhill, Third Edition.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo , 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta. BPFE UGM.
- Rajagukguk, 1993, *Pembaharuan Hukum Memasuki PJPT Kedua dalam Era Globalisasi*, Surabaya: Kongres XII Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara R.I.
- , 1993, *Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan*, Jakarta Sekretariat Negara R.I.
- , 1985, *Undang-Undang nomor 12 tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*, (Lembaran Negara No.68 tahun 1985, Penjelasan dalam Lembaran Negara No.312), Jakarta Sekretariat Negara R.I.
- , 1994, *Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*, Jakarta, Sekretariat Negara R.I.
- , 1994, *Undang-Undang No.12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*, Jakarta sekretariat Negara R.I.
- , 1999, *Undang-Undang No.25 tahun 1989, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah*. Jakarta. Penerbit Sejahtera Mandiri.
- R. Tobias Subekti, 1985. *Dasar-dasar Perpajakan*, Jakarta : Penerbit Karunika, Universitas Terbuka.
- R. Sa'ban, 1988. *Pajak Bumi di Indonesia, dari Masa ke Masa: Sejarah Lahir dan Perkembangannya*. Jakarta: Penerbit Yayasan Bina Artha.
- Singgih Santoso, 2000. *SPSS, Mengolah Data Secara Proposional*, Jakarta. Penerbit PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramdeia.
- S. Munawir, 1992. *Perpajakan*, Yogyakarta : Penerbit Liberty.
- Suparmi, 1986. *Dampak Penggantian Ipeda dengan PBB terhadap Pemerintah dan Beban Wajib Pajak*, Yogyakarta: Tesis , Program Pascasarjana UGM.
- Scheaffer, Richard L, William Menden Mendenhall, dan Lyman Ott.1979, *Elementary Survey Sampling*, 2nd Edition, North Scituate, Massachusetts: Duxbury Press.
- Schroeder, Richard G., Levis D. McCullers and Myrtle Clark, 1987, *Accounting Theory: Tex And Readings*, 3 rd edition, New York, John Wiley and Sons.
- Suroso Imam Zadjuli, , 1995, *Dinamika Ekonomi Indonesia dari Masa ke Masa*, Surabaya: Universitas Airlangga Pidato Pengukuhan Guru Besar.
- Sugandhan Dann, 1992, *Pengantar Administrasi Negara*, Jakarta, Intermedia.

Tubagus Chairul Amachi Zandjani, , 192. *Perpajakan*, jakarta: PAU-EK-UI dengan Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Zaki Baridwan, 1992. *Peranan Penelitian dalam Pengembangan Profesi dan Disiplin Akuntansi Memasuki abad ke 21*, Yogyakarta: Presiding Konvensi Nasional Akuntansi ke 2 Ikatan Akuntan Indonesia.